



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018 beserta realisasinya.

Selama tahun 2018, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2019

Plt. Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Syafruddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan sepanjang periode Januari - Desember 2018 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi *Output* dan *Outcome*

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan berjumlah 296 rekomendasi, atau sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Perhubungan (100%). Sementara *outcome* atau rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perhubungan dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait sebanyak 66 rekomendasi.

b. Dari Segi Anggaran

Sepanjang periode Januari-Desember 2018, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp.568.398.426,00 dari pagu anggaran revisi Rp. 570.000.000,00 lebih hemat sebanyak Rp.1.601.574,00 dari total anggaran Tahun 2018 atau dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,71 %.

c. Dari Segi Akuntabilitas Kinerja

Dalam mengatasi kendala belum optimalnya proses mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan unsur lain di luar pemerintahan, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan teknologi informasi *E-Government* yang salah satunya adalah SITAP atau Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden. Pengembangan aplikasi teknologi informasi tersebut merupakan perwujudan implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Meskipun telah berjalan dan diaplikasikan, SITAP dalam implementasinya masih belum optimal sehingga masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan akan sistem informasi yang terpadu sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018	1
1.2.1. Struktur Organisasi	2
1.3. Gambaran Aspek Strategis.....	6
1.4. Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Gambaran Umum	10
2.2. Perjanjian Kinerja dan Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018	11
2.2.1. Perjanjian Kinerja	11
2.2.2. Dukungan Anggaran	12
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	17
3.1. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018.....	17
1.1. Capaian Output Berdasarkan Bidang.....	22
1.2. Kegiatan Strategis yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan	23
1.2.1. <i>Hot Issues</i> yang Ditindaklanjuti Oleh Asdep Bidang Perhubungan.....	23
3.4. Penggunaan Aplikasi SITAP.....	41
3.5. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan TA 2018.....	41
3.5.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.6. Kendala dan Solusi	43
BAB IV PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Nama-Nama Pejabat/Pegawai Asdep Bidang Perhubungan.....	5
Tabel 2: Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018.....	11
Tabel 3: Dukungan Anggaran Asdep Bidang Perhubungan TA 2018.....	12
Tabel 4: Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Setelah Revisi Akhir 2018	12
Tabel 5: Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018	13
Tabel 6: Capaian Sasaran Strategis	18
Tabel 7: Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.....	19
Tabel 8: Janji Presiden pada saat Kunjungan Kerja ke Beberapa Daerah	38
Tabel 9: Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018.....	42
Tabel 10: Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2018.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	4
Gambar 2: Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	4
Gambar 3: Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar 4: Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan	7
Gambar 5: Sistematika Penyajian	8
Gambar 6: Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan	10
Gambar 7: Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan Bulan Tahun 2018 ..	20
Gambar 8: Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan Output dan Outcome tahun 2018 dan 2017	20
Gambar 9: Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 dan Tahun 2017 berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
Gambar 10: Capaian Output/Rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 per bidang	22
Gambar 11: Suasana Rapat Pembangunan Bandara Kediri di Ruang Rapat Kantor Bupati Kediri	23
Gambar 12: Rapat Koordinasi di Polda Sumatera Utara pada 16 Juli 2018.....	27
Gambar 13: Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Seskab tanggal 31 Januari 2018.....	30
Gambar 14: Suasana Rapat di Ruang Rapat Seskab tanggal 4 April 2018	32
Gambar 15: Suasana Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Seskab tanggal 23 Mei 2018	33
Gambar 16: Pemantauan Progres Pembangunan Bandara Kulonprogo oleh Plt. Asdep Bidang Perhubungan.....	36
Gambar 17: Suasana Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Seskab tanggal 17 Januari 2018 ..	40
Gambar 18: Jumlah Isian SITAP Pada Masing-Masing Bidang Penanggungjawab	41

BAB I PENDAHULUAN

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 disusun dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara berjenjang dimulai dari Keasdepan, Kedeputian, sampai dengan Kelembagaan.

Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman merupakan satuan organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sekretariat Kabinet.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kemaritiman, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) guna mengevaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apa yang telah sesuai dengan rencana dari setiap indikator sasaran.

1.2. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang perhubungan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

1.2.1. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan didukung oleh 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

1. **Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian**

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subbidang Transportasi Darat; dan
- b. Subbidang Transportasi Perkeretaapian.

2. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut.

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

- a. Subbidang Kepelabuhanan;
- b. Subbidang Kenavigasian.

3. Bidang Perhubungan Udara

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan

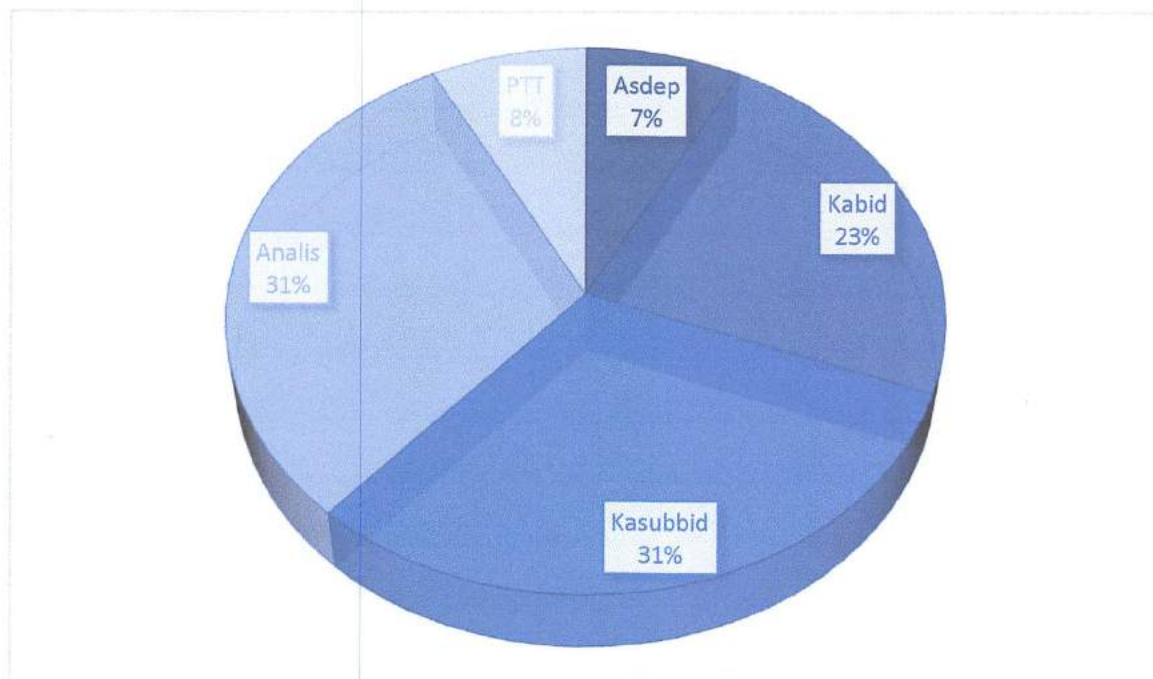
terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :

- a. Subbidang Angkutan dan Bandar Udara;
- b. Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan.



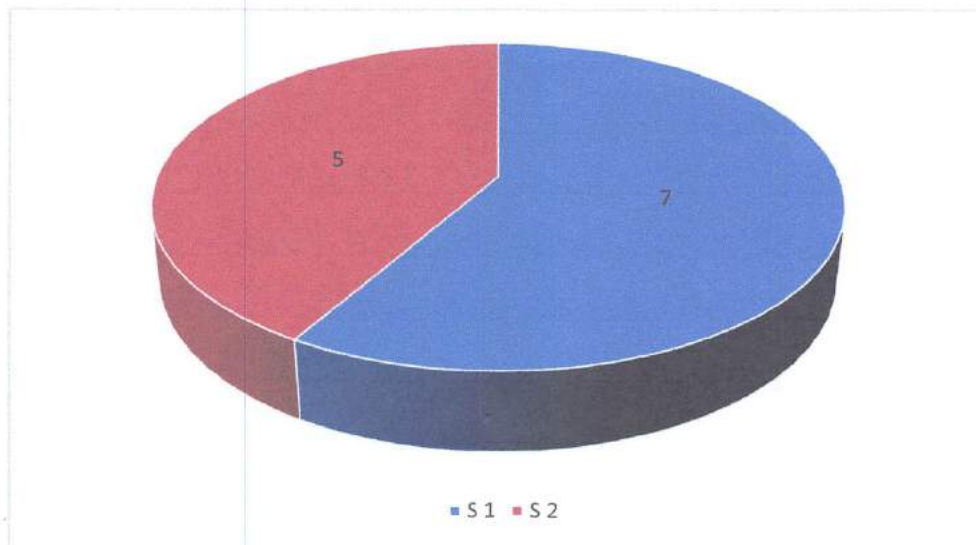
Gambar 1: Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Gambar 2: Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan tahun 2018 sebanyak 12 orang, pejabat struktural berjumlah 8 (delapan) orang serta staf analis sebanyak 4 (empat) orang. Selain itu, terdapat Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 1 (satu) orang.

Jika dilihat dari formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan per tanggal 31 Desember 2018, eselon II (Asisten Deputi) berjumlah 1 (satu) orang, Eselon III (Kepala Bidang) berjumlah 3 (tiga) orang, Eselon IV (Kepala Subbidang) berjumlah 4 (empat) orang.



Gambar 3: Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, Sumber Daya Manusia di Keasdepan Bidang Perhubungan terdiri dari 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu sarjana (S1) sebanyak 6 (enam) pegawai, master (S2) sebanyak 6 (enam) pegawai,

Tabel 1: Nama-Nama Pejabat/Pegawai Asdep Bidang Perhubungan

NO.	NAMA, NIP	PANGKAT	JABATAN
1	Syafruddin, S.H., M.H, 19610215 199311 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Plt. Asdep Bidang Perhubungan
2	M. Faisal Yusuf, S.IP.,M.Si. 19741127 200501 1 010	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
3	Romi Fajar Ali, S.H. 19880424 201012 1 006	Penata (III/c)	Kasubid Transportasi Darat
4	Mela Meilania, S.AP 19810525 200912 2 002.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubid Transportasi Perkeretaapian
5	Chairul Saleh, S.H., L.LM. 19760831 200212 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Perhubungan Laut
6	Muhammad Eky Marzuki, S.E. 19890209 201502 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subbidang Kelautan
7	Benni Kusriyadi, S.ST 19830701 200501 1 001	Penata (III/c)	Kasubid Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut
8	Adnan, S.Sos. 19620603 198303 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perhubungan Udara

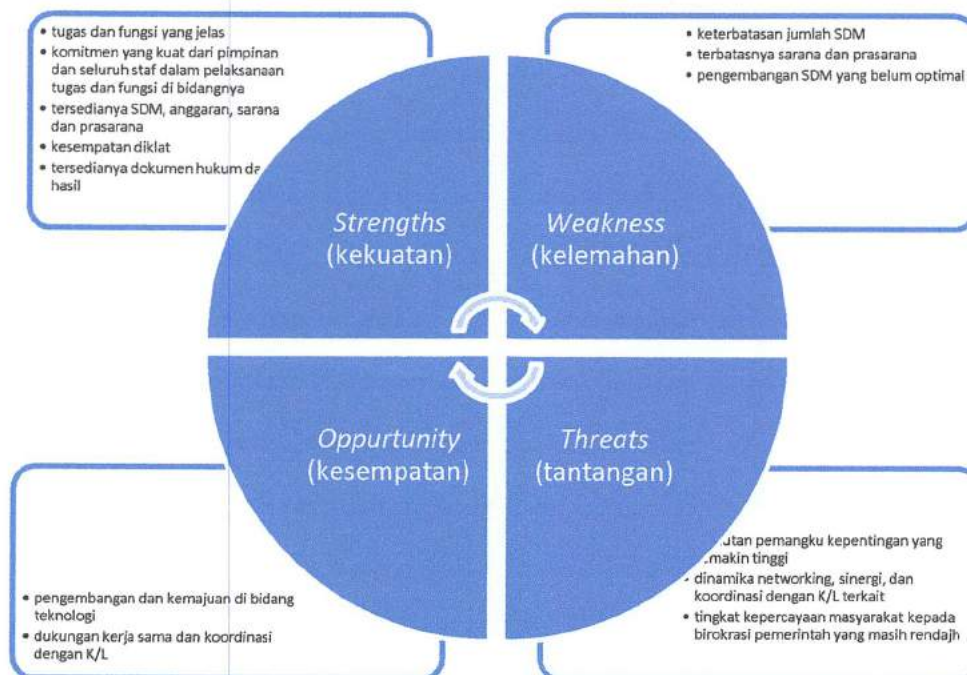
NO.	NAMA, NIP	PANGKAT	JABATAN
9	Rojat, S.Sos 19680611 199503 1 001	Penata (III/c)	Kasubbid Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan
10	Manda KumoroSaraswati, S.E. 19910205 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subsid Angkutan dan Bandar Udara
11	Nabila Azwida Faradisa, S.H. 19930710 201801 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum pada Subsid Transportasi Darat
12	Hami Prabowo, S.E. 19930213 201801 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subsid Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan.

1.3. Gambaran Aspek Strategis Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan organisasi, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Untuk membantu mengetahui potensi dan permasalahan dalam organisasi, dapat digunakan Analisis *SWOT* (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan dalam Gambar 4.

Dari diagram SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4: Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan dasar Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang signifikan dan berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas dan Fungsi yang jelas;
- 2) Komitmen kuat yang dimiliki pimpinan dan seluruh staf untuk mencapai sasaran kerja;
- 3) Tersedianya SDM, anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung kewenangan menjalankan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan;
- 4) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural, dan teknis dalam rangka *capacity building*;
- 5) Tersedianya dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat, dan atau pertemuan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Setiap organisasi memiliki kelemahan atau kekurangan, begitu juga dengan Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang perlu mewaspadaai kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi untuk dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

- 1) Jumlah SDM masih terbatas dan banyak jabatan/posisi yang belum terisi.

- 2) Sarana dan prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan dan belum sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan.
- 3) Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM belum sepenuhnya optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c. Peluang (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dapat menciptakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis sehingga pejabat/pegawai dapat mendapatkan akses informasi dengan cepat;
- 2) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak (Kementerian/Lembaga terkait).

d. Tantangan (*Threats*)

Disamping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal juga dapat menjadi ancaman bagi organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah :

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah;
- 2) Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi;
- 3) Dinamika *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :



Gambar 5: Sistematika Penyajian

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.

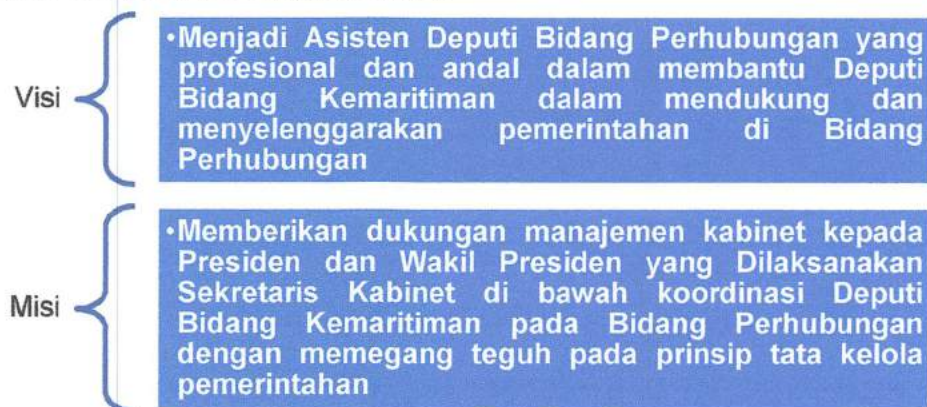
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Gambaran Umum

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perencanaan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perencanaan Kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, namun juga patut mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan juga masyarakat.

Rencana Strategis yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet menjadikan dasar bagi penetapan visi dan misi segenap jajaran selon atau pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Adapun Keasdepan Bidang Perhubungan memiliki visi dan misi sebagai berikut :



Gambar 6: Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Selain susunan Perencanaan Kinerja, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018. Pada awalnya anggaran Asdep Bidang Perhubungan T.A 2018 dianggarkan sebesar Rp. 950.000.000,-. Kemudian, dilakukan pemindahan anggaran untuk keperluan Tunjangan Kinerja Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2018 sebesar Rp.380.000.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 570.000.000,00.

2.2. Perjanjian Kinerja dan Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

2.2.1. Perjanjian Kinerja

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target 100 persen.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Perhubungan, Target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Keasdepan Bidang Perhubungan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

2.2.2. Dukungan Anggaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Asdep bidang Perhubungan TA 2018, Keasdepan Bidang Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Tabel 3: Dukungan Anggaran Asdep Bidang Perhubungan TA 2018

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. 677.425.000,00
2	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan	Rp.76.210.000,00
3	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet , Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan / atau Dihadiri oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden	Rp.196.365.000,00
Total Anggaran		Rp. 950.000.000,00

Pada saat pelaksanaan penggunaan anggaran, telah beberapa kali mengalami revisi. Adapun revisi anggaran posisi terakhir Asdep Bidang Perhubungan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4: Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Setelah Revisi Akhir 2018

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. .533.288.000,00
2	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan	Rp.28.972.000,00
3	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet , Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan / atau Dihadiri oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden	Rp. 7.800,00
Total Anggaran (Pagu Revisi)		Rp. 570.000.000,00

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sasaram strategis Kedeputan Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menetapkan IKU tahun 2018. Adapun Sasaran Strategis dan IKU yang tertera pada Tabel 5.

Tabel 5: Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disampaikan oleh Asisten}} \times 100\%$

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			Deputi Bidang Perhubungan kepada Sekretaris Kabinet
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPUU) di bidang perhubungan. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum Asisten Deputi Bidang Perhubungan terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang perhubungan yang disetujui oleh deputi Bidang Kemaritiman $\times 100\%$ Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang perhubungan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan. Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet $\times 100\%$ Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan secara rinci melalui indikator sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, yang diukur indikator yaitu "disetujui". Indikator persentase rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Sekretaris Kabinet, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Jika hal tersebut ditarik ke atas, maka akan terlihat peranan unsur-unsur di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

3.1. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan adalah "Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan". Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan indikator kinerja, yaitu **"disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman"**, meliputi: 1). Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan; 2). persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan ; 3).Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan.

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

a. Top Down

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada *stakeholders*.

b. Bottom Up

Diukur mulai adanya ide awal seperti pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) serta pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diserahkannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “disetujui” dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 6: Capaian Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

Rekomendasi di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman

Yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang perhubungan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan ditindaklanjuti adalah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung arti bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Sekretaris Kabinet, Presiden, ataupun Wakil Presiden khususnya dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi “*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman*”, dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

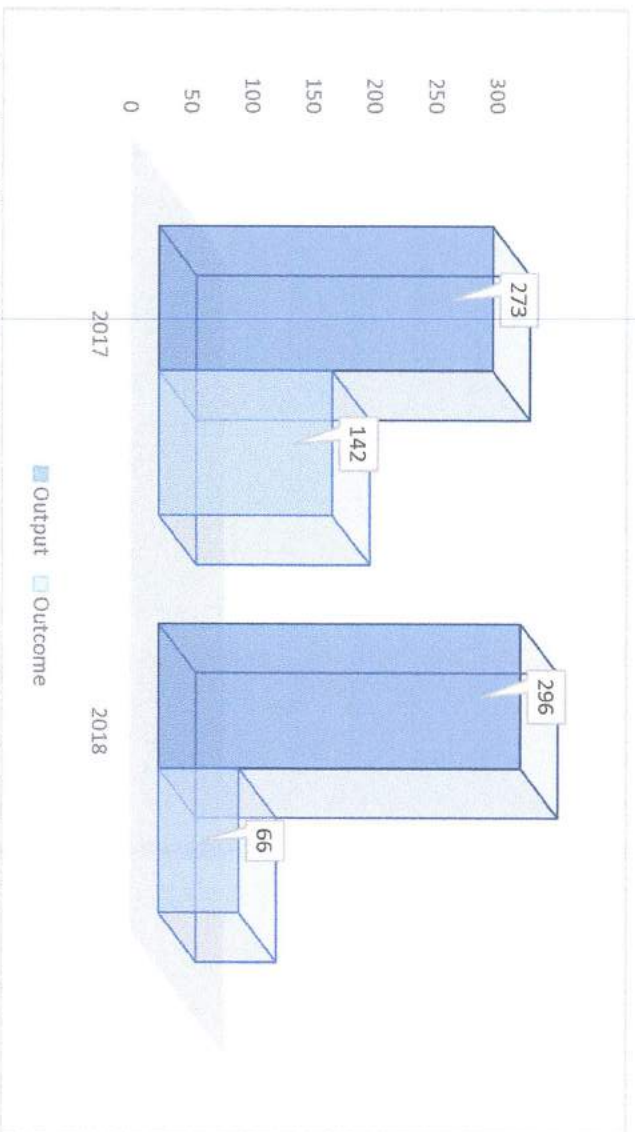
Pada tahun 2018, rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah berkas (*output*). Jumlah tersebut 2,1 kali lebih banyak dari target output awal yang hanya 140 berkas (rekomendasi). Dari 296 berkas *output*, rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan sebanyak 197 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan sebanyak 57 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan sebanyak 42 berkas, yang rinciannya dapat lihat pada Tabel 7.

Tabel 7: Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman

No	Uraian	Jumlah
1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan	197 berkas
2	Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan	57 berkas
3	Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	42 berkas
Total		296 berkas

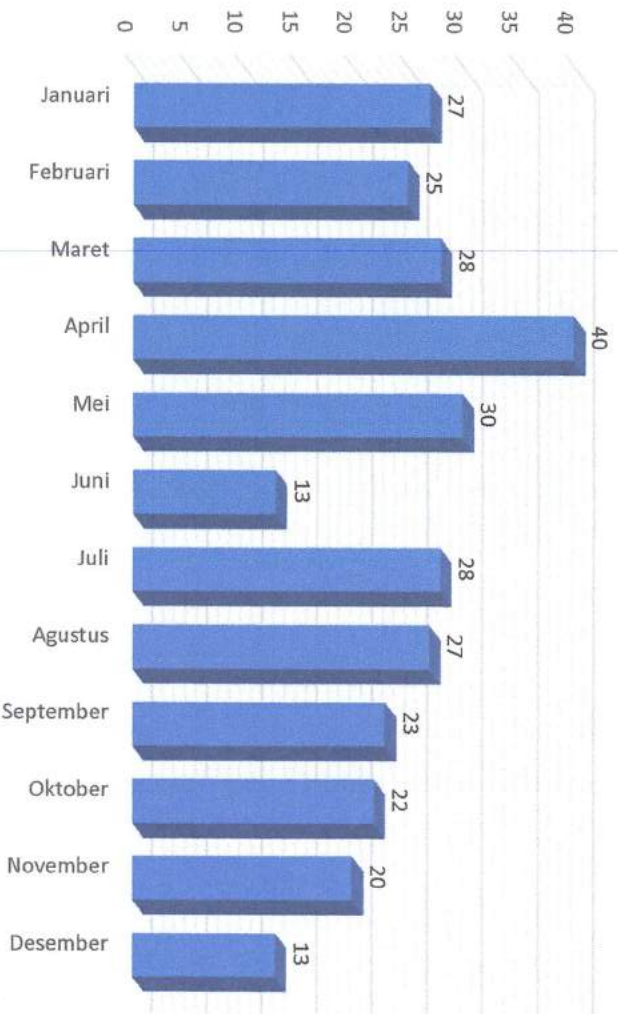
Apabila diperinci ke dalam bulan, berikut merupakan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan dari bulan Januari s.d. Desember 2018, dimana output terbanyak yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan terdapat pada bulan April 2018, dengan capaian output sebanyak 40 output.

Gambar 7: Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan Bulan Tahun 2018

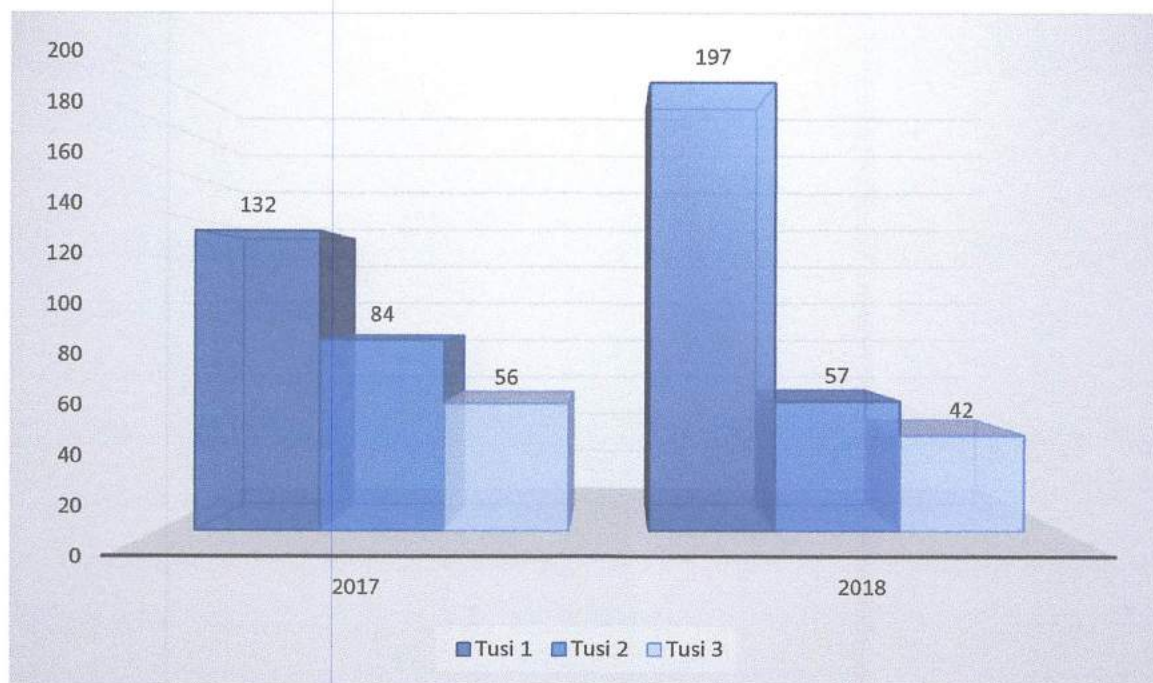


Gambar 7 Menunjukkan perbandingan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan di Tahun 2017 dan 2018 dilihat dari *output* dan *outcome*. Tahun 2018, Asdep Bidang Perhubungan menghasilkan *output* sebanyak 296 rekomendasi, sementara *outcome* yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 66 rekomendasi, sementara *output* yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017 sebanyak 273 *output* dan *outcome* yang dapat dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 142 rekomendasi. Sesuai dengan

Gambar 8: Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan Output dan Outcome tahun 2018 dan 2017



Gambar 8 menunjukkan perbandingan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 dan Tahun 2017 laporan. Berdasarkan grafik dimaksud, Output yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada Tahun Anggaran 2018 sebanyak 296 berkas, dan dokumen yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 66 berkas (*outcome*), yang artinya 66 berkas rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, Output Asdep Bidang Perhubungan mengalami kenaikan jumlah output (rekomendasi).



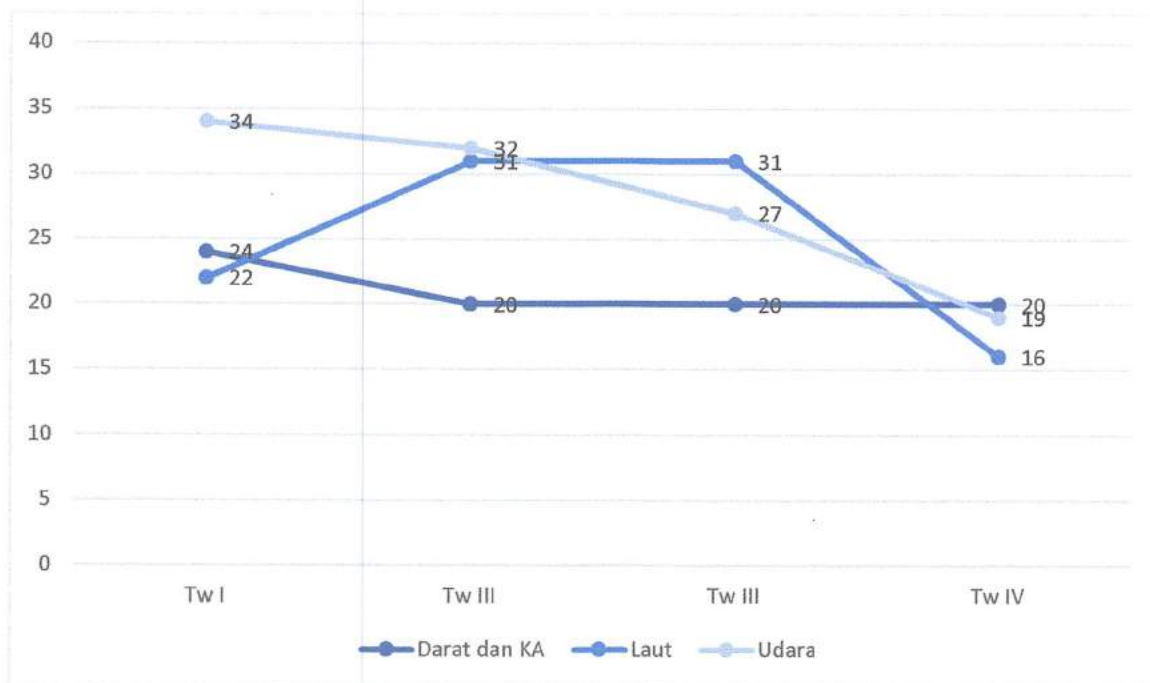
Gambar 9: Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 dan Tahun 2017 berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa baik tahun 2018 dan tahun 2017, output Asep Bidang Perhubungan memiliki output terbanyak pada Tusi satu (1), yakni Rekomendasi Kebijakan di bidang perhubungan, yaitu sebanyak 197 rekomendasi dan 132 rekomendasi masing-masing tahun perbandingan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet, dicapai kesepakatan mengenai metode penghitungan *output* dan *outcome* pada tahun 2018 jika dibandingkan pada tahun 2017. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Sekretariat Kabinet masih menggunakan 6 tugas dan fungsi, sedangkan pada tahun 2018 disimplikasi menjadi 3 tugas dan fungsi.

1.1. Capaian Output Berdasarkan Bidang

Gambar 9 menunjukkan capaian output/rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018. Dari ketiga bidang di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan, yakni Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Bidang Perhubungan Laut, dan Bidang Perhubungan Udara. Pada tahun 2018, Bidang Perhubungan Udara menyumbang kontribusi atau dokumen paling banyak yaitu sebanyak 112 rekomendasi, terbanyak kedua adalah Bidang Perhubungan Laut sebanyak 100 rekomendasi, dan terakhir Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian yang menghasilkan 84 rekomendasi.



Gambar 10: Capaian Output/Rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 per bidang

1.2. Kegiatan Strategis yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan

1.2.1. Hot Issues yang Ditindaklanjuti Oleh Asdep Bidang Perhubungan

1.2.1.1. Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan

1. Pembangunan Bandara Kediri



Gambar 11: Suasana Rapat Pembangunan Bandara Kediri di Ruang Rapat Kantor Bupati Kediri

Proyek Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Kediri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan akan di-*groundbreaking* pada awal tahun 2019.

Terhadap penetapan sebagai PSN tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 3 Juli 2018 telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang dihadiri para pejabat eselon 1 dan eselon II dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, salah satu persoalan yang masih menjadi hambatan berkaitan dengan kesesuaian tata ruang. Untuk itu, rapat menyepakati:

- a. agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, guna melakukan percepatan:
 - 1) perubahan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kediri; atau

2) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kediri; untuk menjelaskan kesesuaian pembangunan Bandar Udara Kediri tersebut dengan tata ruang.

- b. Kesepakatan rapat oleh Sekretaris Kabinet telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Surat Nomor: B-312/Seskab/Maritim/7/2018 tanggal 11 Juli 2018) untuk mengoordinasikan langkah-langkah percepatan dan monitoring pemenuhan persyaratan pembangunan Bandar Udara Kediri tersebut, termasuk pembahasan wilayah ruang udara dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) antara Kementerian Perhubungan, TNI-AU, PT AirNav Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kemenko Bidang Kemaritiman pada tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Bupati Kediri-Jawa Timur, menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan pembangunan Bandar Udara Kediri, dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, dihadiri Bupati Kediri bersama dinas terkait, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dirjen Tata Ruang Kemen. ATR/BPN, wakil dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur, PT Surya Dhoho Investama (investor) dan Sekretariat Kabinet, rapat pada intinya membahas:

Pembangunan Bandar Udara Kediri sebagai Proyek Strategis Nasional akan dilaksanakan oleh swasta, dan direncanakan dapat di-*groundbreaking* pada Maret tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal bersifat administratif yang masih perlu dipenuhi:

1. dokumen *study* kelayakan yang disampaikan calon investor, masih perlu penyempurnaan terkait rencana induk/*Detail Engineering Design (DED)*;
2. penetapan izin lokasi dari Kementerian Perhubungan belum dikeluarkan, sehubungan dengan:
 - a. perlunya perbaikan studi rencana induk dari calon investor;
 - b. rekomendasi Gubernur/Bupati terkait kesesuaian tata ruang; keselarasan tata ruang, pembangunan Bandara, belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri, guna percepatan pembangunannya:

Tugas Kementerian/Lembaga terhadap Pembangunan Bandara Kediri berdasarkan rapat/pertemuan yang telah dilakukan

- 1) Kementerian Perhubungan:
 - merevisi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Letak Kebandarudaraan dengan memasukkan pembangunan Bandar Udara Kediri;

- izin prinsip pembangunan Bandar Udara Kediri telah diterbitkan, sedang untuk penetapan izin lokasi direncanakan minggu ke-tiga Juli sudah diterbitkan;
- 2) Pemerintah Kabupaten Kediri bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara paralel untuk segera menyelesaikan persyaratan perubahan Perda Tata Ruang Kabupaten Kediri, antara lain:
- tanggal 16 Juli 2018 Pemkab. Kediri akan mengajukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kepada Pemprov. Jawa Timur, *time line* selesai validasi dari Pemprov Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2018;
 - rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Gubernur Jawa Timur dan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait peta geospasial terdetail, *time line* tanggal 31 Agustus 2018;
 - pengajuan rancangan perubahan Perda RTRW Kabupaten Kediri kepada DPRD Kabupaten Kediri, *time line* tanggal 31 Agustus 2018;
- 3) Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan persetujuan substansi tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (target tanggal 12 September 2018); mengingat perubahan Perda harus dibahas bersama dalam sidang paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Kediri menargetkan perubahan Perda RTRW Kabupaten Kediri telah mendapat persetujuan dewan untuk ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2018.
- 4) Kemenko Bidang Kemaritiman akan mengoordinasikan rapat lanjutan guna percepatan pembangunan Bandar Udara Kediri, termasuk pembahasan wilayah ruang udara dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dengan Kemenhub, TNI-AU, dan PT AirNav Indonesia serta Pemda Kabupaten Kediri.
- 5) Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor: 2373/29.1-600/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait guna mempercepat langkah-langkah pembangunan PSN dimaksud dengan mempedomani UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan selanjutnya untuk melaporkan perkembangannya kepada Menteri ATR/BPN.
- 6) Rapat di Kemenkomar tanggal 19 Oktober 2018 dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri Perhubungan (tindak lanjut rapat tanggal 12 Juli 2018 di Kantor Bupati Kediri), diperoleh penjelasan sbb:

- a. Kementerian Perhubungan:
 - Rencana Bandar Udara Kediri telah dimasukkan kedalam Review Tataan Kebandarudaraan Nasional;
- b. PT AP I (Persero):
 - 12 April 2018 Rekomendasi Kepala Staf TNI AU tentang Rekomendasi Penggunaan Ruang Udara untuk Bandara Baru di Kab. Kediri (B/133/IV/2018);
 - 13 April 2018 Bupati Kediri kepada Menteri ATR/BPN mengajukan permohonan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Kediri (553.2/997/418.54/2018/DU-B);
 - 4 Mei 2018 Ijin Kelayakan Dirjen Perhubungan Udara perihal Izin Prinsip Kelayakan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri, Jawa Timur (AU.101/2/5/DRJU.DBU-2018);
 - AP I tanggal 4 Mei 2018 kepada Menteri Perhubungan menyampaikan Minat Pengelolaan Bandara Kediri (AP.I.2841/KB.06/2018/DU-B);
 - tanggal 3 September 2018 PT AP I bersama Direktorat Bandar Udara melakukan kunjungan ke PT Surya Dhoho dalam rangka site vitsit dan pembahasan draft Memorandum of Understanding (MoU).
- c. Pemprov. Jawa Timur, menyampaikan beberapa hal yang harus dilengkapi Pemkab. Kediri guna segera memperoleh Rekomendasi Gubernur, antara lain:
 - 1) Pemkab Kediri agar Segera menyampaikan revisi RTRW Kab. Kediri sesuai masukan dari Tim BKPRD Provinsi;
 - 2) Untuk revisi RTRW menunggu rekomendasi dari BIG;
 - 3) menyelesaikan validasi atas dokumen KLHS revisi RTRW Kab. Kediri dan menyampaikan Berita Acara Kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemda Kabupaten dengan DPRD Kabupaten;
 - 4) Pembahasan BKPRD Prov. Jawa Timur dalam pemberian rekomendasi Gubernur tidak hanya menyangkut Pembangunan Bandar Udara Kediri tetapi evaluasi dokumen secara menyeluruh agar substansi yang diatur dalam dokumen Revisi RTRW Kab. Kediri sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018, sehingga substansi dapat mengakomodir kebutuhan pengembangan wilayah dalam 5 tahun kedepan (karena RTRW dapat direvisi untuk 5 tahun);
- d. PT Surya Dhoho (Investor/PT GG) menyampaikan:

- 1) Kesesuaian dengan Tata Ruang (revisi Perda Tata Ruang Kab Kediri) dalam proses persetujuan DPRD Kab. Kediri (RDP 9 Oktober 2018);
- 2) permohonan penetapan pemprakarsa KPBU telah disampaikan kepada Menhub tanggal 21 Mei 2018;
- 3) Penyelesaian pengadaan lahan (Rumah, Sekolah, T. Bengkok, Tanah Non Pajak, Fasum (Jalan, Sungai, Irigasi)) saat ini dalam proses akuisisi;
- 4) Penlok dan Rencana Induk Bandara (menunggu: Rekomendasi Bupati, Rekomendasi Gubernur, Rencana Induk Nasional Bandara, Izin Penlok dan Rencana Induk) saat ini sedang menunggu revisi RTRW;
- 5) Izin Lingkungan, AMDAL oleh Komisi AMDAL Pusat, Ka ANDAL dikirim ke AMDAP Pusat tanggal 17 Oktober 2018.

2. Percepatan Operasional Dry Port dan konektivitas kereta api trase Sei Mangkei- Pelabuhan Kuala Tanjung di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara

- a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 dan merupakan KEK pertama di Indonesia yang telah diresmikan beroperasi



Gambar 12: Rapat Koordinasi di Polda Sumatera Utara pada 16 Juli 2018

oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015. KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara memiliki bisnis utama berupa industri kelapa sawit dan karet dan difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional.

- b. KEK Sei Mangkei didukung dengan infrastruktur di dalam dan luar kawasan. Akses dari KEK Sei Mangkei ke jalan lintas Sumatera kurang lebih 10 km, jarak ke Pelabuhan Kuala

Tanjung kurang lebih 40 km dan jarak ke Bandara Internasional Kualanamu kurang lebih 110 km.

- c. Infrastruktur dalam kawasan yang menjadi daya tarik investor di sektor agro industri, sebagai berikut:
 - Tersedia pasokan listrik kapasitas 60 MW yang bersumber dari Gardu Induk di KEK, dan direncanakan beroperasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas 250 MW pada 2018
 - Tersedia pasokan air kapasitas 250 m³/jam yang bersumber dari Sungai Bah Tungguran, dan direncanakan beroperasi instalasi pengolahan air tahap II kapasitas 500 m³/jam pada Maret 2017.
 - Tersedia pasokan gas sebesar 75 mmscfd yang bersumber dari Kilang Regasifikasi Arun.
 - Tersedia *dryport* kapasitas 5.300 TEUs/tahun
 - Tersedia tangki timbun kapasitas 2 x 3.000 Ton (CPKO) dan 1 x 5.000 Ton (CPO)
 - Fasilitas lain yang tersedia adalah sarana persampahan, armada pemadam kebakaran, pusat inovasi kelapa sawit, dan perumahan.
- d. Namun, dalam rentang waktu tersebut, KEK Sei Mangkei dirasa belum optimal dalam pengoperasiannya, sehingga Kedeputan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menginisiasi penyelesaian percepatan operasional KEK Sei Mangkei, yang juga sekaligus direncanakan untuk mendukung peresmian Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei oleh Presiden pada bulan Februari 2019, dengan fokus pembahasan pada konektivitas kereta api Sei Mangkei-Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan dan *Dry Port* Sei Mangkei.
- e. Dalam rangka percepatan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2012 dan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah diselenggarakan rapat pembahasan di Sekretariat Kabinet tanggal 3 Juli 2018, yang dihadiri oleh pejabat eselon I Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretaris Dewan Nasional KEK, dan wakil-wakil dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III).
- f. Rapat tersebut menyimpulkan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) PTPN III sebagai badan usaha pengelola KEK Sei Mangkei segera melengkapi setiap persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk proses perizinan tersebut secara lengkap dan benar.
 - 2) Sekretariat Dewan Nasional KEK melakukan pengendalian atas pemenuhan dan penyampaian persyaratan untuk mendapat izin-izin tersebut dari Kementerian

Perhubungan, termasuk penyelesaian untuk pendirian badan usaha pengelola KEK Sei Mangkei dan penuntasan pembangunan jalur kereta api KEK Sei Mangkei–Pelabuhan Kuala Tanjung/Pelabuhan Belawan.

- 3) Kementerian Perhubungan segera menerbitkan izin pembangunan dan izin pengoperasian terkait *dry port* Sei Mangkei setelah dokumen persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Kemenko Bidang Perekonomian melakukan pengendalian atas penyelesaian, penerbitan izin-izin yang dibutuhkan dalam rangka pengoperasian *dry port* Sei Mangkei oleh Kementerian Perhubungan.
 - 5) Menko Bidang Perekonomian, Kementerian/Lembaga terkait, bersama dengan Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, pihak TNI, dengan difasilitasi Sekretariat Dewan Nasional KEK, akan mengoordinasikan penyelesaian permasalahan terkait klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat pada 3 (tiga) titik di wilayah yang dibangun trase kereta api KEK Sei Mangkei–Pelabuhan Kuala Tanjung, dengan mendorong pemberian dukungan keamanan dari aparat penegak hukum, yang akan dilaksanakan di Polda Sumatera Utara.
- g. Beberapa progres tindak lanjut hasil kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet dan Polda Sumatera Utara, yang telah tercapai antara lain:
- 1) Menko Bidang Perekonomian, Kementerian/Lembaga terkait, bersama dengan Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, pihak TNI, dengan difasilitasi Sekretariat Dewan Nasional KEK telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 16 Juli 2018 di Polda Sumatera Utara, yang menyepakati:
 - a. Jajaran Polda Sumatera Utara mendukung dan akan terus terlibat dalam memberikan pengamanan dan pengawalan pada pembangunan jalur trase Bandar Tinggi-Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung.
 - b. Dalam memberikan pengamanan dan pengawalan tersebut dilakukan secara humanis dan preventif guna meminimalisir konflik di masyarakat dengan mengedepankan hak-hak masyarakat secara komunikatif, yang melibatkan, perangkat Pemerinah Daerah, tokoh masyarakat dan pemuka agama.
 - c. Kementerian Perhubungan membangun jalur kereta api Bandar Tinggi-Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung serta prasarana/sarana akan diselesaikan dengan target 1 (satu) minggu.

- 2) PT KAI Divisi Regional I Sumatera Utara telah melakukan ujicoba jalur kereta api barang rute Bandar Tinggi, Batu Bara – Pelabuhan Kuala Tanjung dengan jarak tempuh 1 jam, sepanjang 21,5 km , pada tanggal 10 Oktober 2018.
 - 3) Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan izin pembangunan dan pengoperasian *dryport* Sei Mangkei, dan sedang berproses saat ini penerbitan *International Port Code* (ID Port) dan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dimana PT Kinra sebagai operator *dryport* Sei Mangkei.
 - h. Presiden direncanakan akan meresmikan Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung dengan simulasi pengiriman ekspor kargo dari KEK Sei Mangkei yang terintegrasi jalur kereta api Bandar Tinggi – PHI Kuala Tanjung, pada bulan Februari 2019.
- 1.2.1.2. Rekomendasi Kebijakan Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Perhubungan*
1. **Reviu substansi antara Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional**



Gambar 13: Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Seskab tanggal 31 Januari 2018

Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (*Jabodetabek Circular line*) merupakan salah satu proyek yang termuat dalam lampiran Perpres tersebut. Dalam pelaksanaannya diketahui bahwa proyek tersebut sebelumnya telah ditugaskan kepada PT KAI melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya diketahui terdapat

permasalahan-permasalahan yang menghambat penyelesaian proyek. Terkait dengan permasalahan tersebut Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi untuk membantu penyelesaiannya, diantaranya

- a. rapat pada tanggal 31 Januari 2018 yang dihadiri wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPKP, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Commuter Line. Rapat membahas rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membangun prasarana berupa jalur kereta api melalui jalur lingkaran (*Circular Line/Loopline*) Jabodetabek sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbentur kepada Perpres Nomor 83 Tahun 2011 yang diindikasikan memiliki kesamaan pekerjaan. Dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2011 disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian bersumber dari dan diusahakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait.

Rapat menyepakati :

- 1) Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan BPTJ untuk memeriksa kembali *trase* penugasan PT KAI (Persero) baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 maupun dalam Rencana Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian yang disusun oleh PT KAI (Persero), apakah mempunyai kesamaan dengan *trase* perencanaan pembangunan *loopline* yang disiapkan oleh BPTJ;
- 2) Untuk itu, PT KAI (Persero) agar segera menyampaikan dokumen perencanaan prasarana dan sarana perkeretaapian yang telah disusun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor B.105/Maritim/2/2018 tanggal 15 Februari 2018.

- b. rapat pada tanggal 4 April 2018 yang dihadiri Kepala BPTJ, wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Rapat membahas bahan rapat terbatas terkait hasil evaluasi KPPIP terhadap 245 PSN, dan direncanakan akan mengurangi sebanyak 16 PSN termasuk Jabodetabek Circular Line.



Gambar 14: Suasana Rapat di Ruang Rapat Seskab tanggal 4 April 2018

Dalam rapat disepakati bahwa penugasan PT KAI dalam Perpres 83 Tahun 2011, berbeda trase dengan Circular Line dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017, BPTJ mengusulkan untuk dilakukan perubahan nomenklatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Hasil rapat tersebut telah dilaporkan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M.124/Maritim/4/2018 tanggal 10 April 2018.

- c. rapat koordinasi pada tanggal 23 Mei 2018 yang dihadiri wakil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, dan PT Kereta Commuter Indonesia. Rapat membahas duplikasi ruang lingkup pelaksanaan kegiatan antara kegiatan Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement Phase I* (Pinjaman JICA No. IP-563) dengan penugasan PT KAI dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011.



Gambar 15: Suasana Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Seskab tanggal 23 Mei 2018

Dalam rapat tersebut diperoleh hasil Ruang lingkup pekerjaan kegiatan Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement Phase I* (pinjaman JICA No. IP-563) tidak termasuk dalam ruang lingkup penugasan PT KAI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 dan mengingat jenis pekerjaan sipil yang meliputi persinyalan, ATP, elektrifikasi dan lain-lain yang tertuang dalam dokumen Studi Kelayakan Bisnis Pengembangan Kereta Api Commuter Jabodetabek yang diajukan PT KAI (Persero) kepada Menteri Perhubungan, saat ini masih dalam kajian dan belum diputuskan persetujuannya oleh Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian, ruang lingkup penugasan PT KAI (Persero) untuk hal tersebut, masih dapat dibahas dan disinkronkan dengan ruang lingkup kegiatan Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement Phase 2* dan *Phase 3*, sehingga tidak terjadi duplikasi.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor B-477/Maritim/5/2018 tanggal 28 Mei 2018.

2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta merupakan salah satu proyek pembangunan bandar udara baru, yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018), dengan target dapat beroperasi pada bulan April 2019. Keberadaan bandara internasional ini akan membuka peluang potensi ekonomi, industri pariwisata dan investasi, mengingat bandar

udara memiliki fungsi yang sangat vital dan menjadi katalisator perkembangan ekonomi regional.

Presiden telah mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) yakni pada tanggal 9 Mei 2016 dengan Arahan Presiden agar Menko Bidang Kemaritiman bersama Menteri terkait dan PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan hal-hal:

- a. Dirut PT AP I menghitung ulang pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan masukan para menteri, seperti:
 - 1) mematangkan *business plan*, IRR dan *Return on Investment (RoI)*;
 - 2) luas lahan bandara dapat diperkecil dari rencana semula;
 - 3) pembayaran tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo dilakukan oleh PT AP I;
 - 4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus tetap diurus;
 - 5) persoalan yang disampaikan Gubernur DI Yogyakarta terkait penanganan relokasi masyarakat agar dicarikan solusinya.
- b. Setelah *business plan* dimatangkan dan *internal rate of return (IRR)* dirasakan sudah cukup baik, Presiden akan membahasnya lebih lanjut dengan para menteri terkait dan segera mengambil keputusan dalam rapat terbatas.

Presiden dalam Acara Babat Alas Nawung Kridha, Bandar Udara Internasional Yogyakarta Baru, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, menyampaikan antara lain :

- a. Babat Alas Nawung Kridha Bandar udara Kulonprogo merupakan ritual dalam upaya membuka, membersihkan, merapikan, dan menata lahan Pesisir Temon agar siap didayagunakan sebagai lokasi pembangunan bandara baru;
- b. pembangunan bandar udara sudah direncanakan sejak tujuh tahun lalu, namun baru tahun ini terlaksana. Untuk memutuskan pembangunan bandara ini butuh keberanian, karena keputusan yang diambil pasti mempunyai risiko. Oleh sebab itu, kalau tidak diputuskan tidak akan selesai sampai kapan pun, sementara Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah terlalu padat, di tahun 2016 ini saja sudah jumlah penumpang yang menggunakan mencapai $\pm 7,2$ juta penumpang padahal kapasitas bandara hanya $\pm 1,6$ juta orang;
- c. angkutan udara baik domestik maupun internasional semakin hari semakin meningkat, hal ini mengingat Yogyakarta, bukan hanya sebagai kota pelajar tapi juga sebagai daerah tujuan wisata, di samping daerah yang menjaga/memelihara nilai-nilai budaya yang menjadi magnet wisatawan;

- d. Presiden berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat warga Kecamatan Temon, yang berkorban memberikan lahannya untuk mendukung pembangunan bandara yang ditargetkan selesai 2019;
- e. pembangunan bandar udara harus dibarengi dengan pembangunan moda transportasi lain agar terintegrasi seperti kereta api, jalan, termasuk jalan tol;
- f. kita semua berharap agar pembangunan bandar udara ini segera dilaksanakan pembangunannya, izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan konstruksinya, sehingga apa yang disampaikan Menteri Perhubungan bahwa bandara ini akan dapat beroperasi Maret 2019 dapat terlaksana, untuk itu pemerintah akan terus memantau perkembangan pembangunan.

Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2017.

Perpres pada intinya memuat:

- a. penugasan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan, dan pemeliharaan;
- b. pendanaan dalam rangka penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dan diusahakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero);
- c. penugasan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan navigasi penerbangan;
- d. dukungan dari kementerian/lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Angkasa Pura I (Persero).

Sesuai Perpres No. 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, target minimum operasi *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) adalah awal bulan April 2018.

Untuk progress saat ini pemasangan pagar batas lahan bandara di NYIA (100%), pekerjaan persiapan (land clearing Galian Timbunan, Deep Soil DC, Deep Soil RIC) (98%), dan pekerjaan pembangunan infrastruktur NYIA. Untuk target minimum operasi terdiri dari pekerjaan : (Airside (*Parallel taxiway, runway, taxi way apron, exit taxiway, holding, stopway, rapid exit taxiway, runway and trip*, RESA, dan *apron* mencapai 50%), *Landside* (bangunan kargo dan EMPU, PKP-PK, sub PKP-PK, Gedung Administrasi, STP, *Power Station*, GWT & Chiller Room, Terminal Penumpang mencapai 50% dan Gedung Parkir mencapai 50%).

Target progress pada akhir Desember 2018 sebesar 50%, sedangkan untuk target progress pada bulan April 2019 sebesar 90%.



Gambar 16: Pemantauan Progres Pembangunan Bandara Kulonprogo oleh Plt. Asdep Bidang Perhubungan

PT. AP I (Persero) sudah berkoordinasi dengan pihak PT. Pertamina (Persero) terkait positioning dari main plot plain di apron dan pipa-pipa pengisian sampai ke pesawat. Untuk lahan sudah dipersiapkan PT. AP I (Persero) dan sudah siap dibangun. PT. Pertamina (Persero) siap melayani kebutuhan bahan bakar pesawat di bandara lokasi New Yogyakarta International Airport (NYIA) pada bulan April 2019, untuk depo permanen Pertamina akan selesai dibangun dalam waktu 2 (dua) tahun.

Airnav bulan Oktober 2018 melakukan tender untuk pembangunan tower dan gedung perkantoran dan untuk lahan sudah siap digunakan. Pembangunan tower *Air Traffic Control*

(ATC) dibutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan sampai beroperasi, apabila AirNav tidak mampu menyelesaikan pembangunan tower ATC tersebut, maka akan disiapkan *mobile tower*.

3. Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara

Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 (Perpres PSN).

Berdasarkan hasil *outline business case* yang disusun KPPIP, proyek pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung tersebut harus didesain secara terintegrasi (*bundling*), guna menarik investor untuk mau berinvestasi pada proyek pengembangan tersebut. Mengingat, pembangunan proyek pengembangan pelabuhan dimaksud menjadi tidak *feasible* bilamana dibangun secara *partial* sendirian, sehingga perlu dibuat secara *bundling* dengan kawasan industrinya, dan proses pembangunannya harus didukung *masterplan development* dengan target *ground breaking* pada Quartal kedua tahun 2019.

Pembangunan proyek pengembangan tersebut, direncanakan dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Tahap I, pembangunan terminal *multipurpose*;
- b. Tahap II, pengembangan kawasan industri 3.000 Ha;
- c. Tahap III, pengembangan *dedicated* atau *hub port*; dan
- d. Tahap IV, pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Saat ini, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 September 2018.

Perpres tersebut diperlukan untuk:

- a. Percepatan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri di Kuala Tanjung.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Perpres pada intinya mengatur:

- a. Penugasan Pemerintah kepada PT Pelindo I (Persero) untuk membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Kuala Tanjung; dan;
- b. Penugasan Pemerintah kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan PT Pelindo I (Persero), untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola Kawasan Industri Kuala Tanjung.
- c. Lingkup penugasan.
 - 1) Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan dan pemeliharaan.
 - 2) Kawasan Industri Kuala Tanjung yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan dan pemeliharaan.



- d. Kewajiban BUMN penerima penugasan untuk menyusun:
 - 1) Dokumen perencanaan pembangunan dan pengoperasian PHI Kuala Tanjung;
 - 2) Dokumen perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Industri Kuala Tanjung.
- e. Kemitraan dengan badan usaha lain untuk pelaksanaan penugasan.
- f. Sumber pendanaan atas pelaksanaan penugasan proyek Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Industri di Kuala Tanjung.

3.3.1.3. Rekomendasi Kebijakan Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat/Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan

Presiden dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah pada periode Desember 2017, menyampaikan janji dan arahan untuk penyelesaian beberapa program pemerintah di bidang infrastruktur sektor transportasi sebagai berikut:

Tabel 8: Janji Presiden pada saat Kunjungan Kerja ke Beberapa Daerah

No	Kunjungan Presiden	Janji Presiden
Di Bidang Perkeretaapian		
1	Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (8 April 2017)	Pembangunan Kereta Api Bandara Adi Soemarmo akan selesai pada tahun 2018.
2	Lokasi Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi (15 Desember 2017)	Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi akan selesai tahun 2020, menggunakan pola padat karya.

Di Bidang Perhubungan Udara		
1	Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (8 April 2017)	Pengembangan terminal Bandara Adi Soemarmo dari seluas 13.000 menjadi 26.000 meter persegi dan perpanjangan runway dari 2.600 menjadi 3.000 meter harus selesai pada tahun 2018.
2	Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Kota Tasikmalaya (10 Juni 2017)	Tahun 2017 perpanjangan <i>runway</i> Bandara Wiriadinata menjadi 1.600 m.
3	SMP Negeri 7, Kabupaten Jember (13 Agustus 2017)	Perluasan Bandara Jember agar diselesaikan pada tahun 2019. Selain perluasan, bandara tersebut juga diharapkan menjadi embarkasi haji.
4	Sela Kunjungan Kerja, Semarang (9 Oktober 2017)	Proyek pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang selesai akhir tahun 2018.
5	Bandar Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara (24 November 2017)	Pemerintah akan memperpanjang <i>runway</i> Bandar Udara Internasional Silangit dari 2.650 meter menjadi 3.000 meter.
6	Lokasi Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi (15 Desember 2017)	Pembangunan bandar udara di Sukabumi akan dimulai tahun 2018 dan ditargetkan selesai tahun 2020.
7	Bandar Udara Nabire (20 Desember 2017)	Bandar Udara Nabire 1. Pemerintah akan membangun terminal penumpang seluas 8000 m ² , dan akan dikembangkan menjadi 15.000 m ² tahap berikutnya. 2. Pembangunan bandara akan selesai paling lambat tahun 2020.
8	Terminal Baru Bandara Internasional Supadio (28 Desember 2017)	Terminal Baru Bandara Internasional Supadio agar segera dimulai dan disiapkan dua runway dengan mempertimbangkan lalu lintas dan traffic-nya.
9	Gedung Merdeka Bandung (28 Desember 2017)	Pembangunan Bandara Kertajati akan selesai dan digunakan pada pertengahan tahun 2018.
Di Bidang Perhubungan Laut		
1	Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon (9 Februari 2017)	Tahun 2018 Pemerintah akan menambah tujuh rute dan 100 kapal untuk seluruh Indonesia, serta kapal besar 1500 GT untuk Provinsi Maluku
2	Pelabuhan Nabire (21 Desember 2017)	Memperbaiki dan memperbesar Pelabuhan Nabire, Papua, perluasan tersebut akan menjadikan Pelabuhan Nabire sebagai pelabuhan penghubung bagi enam kabupaten.

Untuk menindaklanjuti janji dan arahan tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 17 Januari 2018 telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Rapat tersebut menyepakati:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan proyek-proyek tersebut, terutama terkait



dengan penggunaan dan pembebasan lahan;

2. Kementerian Perhubungan untuk segera mengimplementasikan penyelesaian proyek yang telah masuk dalam program/kegiatan kementerian di TA 2018, dan akan mengusulkan sebagian proyek sebagai Proyek Strategis Nasional;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan segera mengoordinasikan antara kementerian/lembaga guna membahas lebih lanjut janji Presiden tersebut, dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (untuk program kegiatan yang belum masuk dalam RKP 2018)

Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-46/Seskab/Maritim/2/2018 tanggal 2 Februari 2018 telah menyampaikan hasil rapat tersebut dan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dapat mengoordinasikan tindak lanjut penyelesaian janji dan arahan Presiden dimaksud, dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden.

Tabel 9: Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. 533.288.000	Rp. 531.758.026	Rp.1.469.974	99,72%
Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan RPUU di Bidang Perhubungan	Rp. 28.972.000	Rp. 28.890.400	Rp.81.600	99,71%
Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	Rp. 7.800.000	Rp. 7.750.000	Rp.50.000	99,35%
Total	Rp. 570.000.000	Rp. 568.398.426	Rp. 1601.574	99,71%

3.5.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 10 menunjukkan akuntabilitas keuangan sasaran strategis Tahun 2018 ,dapat dilihat bahwa dalam mencapai sasaran strategis, Asdep Bidang Perhubungan telah mampu menghasilkan 296 berkas rekomendasi dengan penggunaan dana terealisasi sebesar Rp. 568.398.426,00 (99,71%) dari pagu revisi sebesar Rp.570.000.000,00. Artinya untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp. 1.920.264,00 lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp.1.925.675,00,- sehingga mampu menghemat Rp.5.411,00/output. Anggaran digunakan untuk jenis alokasi perjalanan dinas, dan rapat koordinasi guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

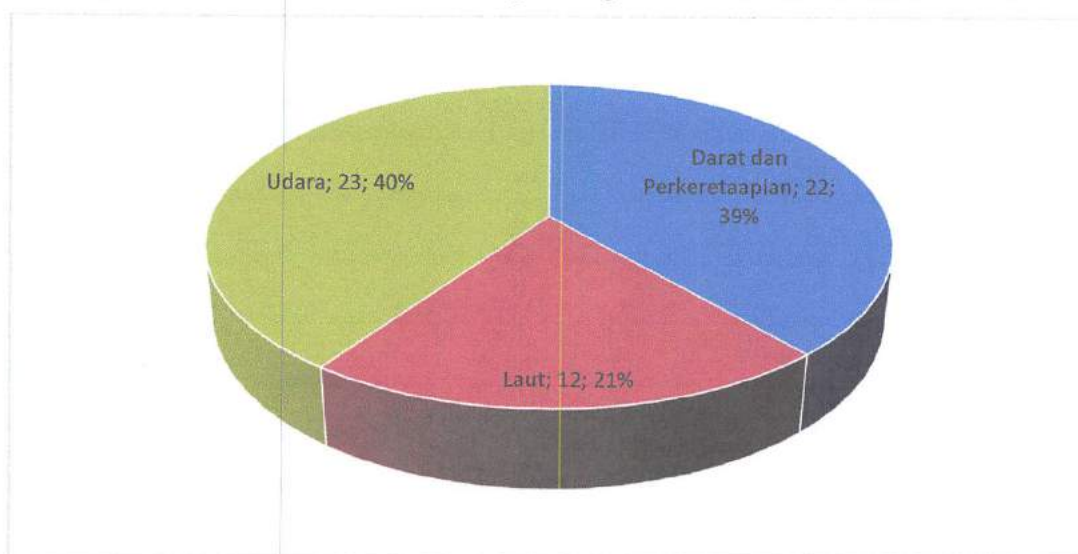
Tabel 10: Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2018

% Capaian Output	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Output yang disetujui : 100%	Rekomendasi yang Berkualitas di	Output	Berkas	296	296
		Input	Rupiah	Rp. 570.000.000,-	Rp. 568.398.426,-

3.4. Penggunaan Aplikasi SITAP

Sesuai dengan amanat reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet mengembangkan aplikasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagai manajemen cabinet dengan menghadirkan aplikasi SITAP (Sistem Informasi Tindaklanjut Arahan Presiden). Aplikasi ini dikembangkan secara mandiri oleh Sekretariat Kabinet dan digunakan bersama Kementerian Koordinator untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing K/L.

Pada tahun 2018, telah dihasilkan beberapa *input* pada aplikasi SITAP terkait dengan arahan Presiden baik pada Sidang Kabinet Paripurna maupun pada Rapat Terbatas sebanyak 47 masukan tindak lanjut arahan Presiden (sebagaimana terlihat pada Gambar 18). Tindak lanjut dibawah koordinasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang dikategorikan bidang Perhubungan Udara sebanyak 23 tindak lanjut atau setara dengan 40% secara umum, sedangkan untuk bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian sebanyak 22 dan bidang Perhubungan Laut sebanyak 12. Jika dilihat lebih detil, sebagian besar tindak lanjut arahan Presiden tersebut, berhubungan dengan pembangunan proyek infrastruktur yang berfokus untuk meningkatkan konektivitas sesuai dengan target dan sasaran RPJMN 2015-2019.



Gambar 18: Jumlah Isian SITAP Pada Masing-Masing Bidang Penanggungjawab

3.5. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan TA 2018

Penyerapan realisasi anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2018 sebanyak **Rp. 568.398.426,-** (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dari pagu anggaran setelah revisi sebanyak **Rp.570.000.000,-** (lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Adapun persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perhubungan sebesar 99,71 persen.

	Bidang Perhubungan	Input rata-rata per output	Rupiah	Rp.1.925.675,-	Rp.1.920.264,-
	1. Penghematan Dana = Rp 1.601.574,- (penghematan anggaran) 2. Efisiensi = Rp.5.411,- /output 3. Efektivitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

3.6. Kendala dan Solusi

Dalam pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2018, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* lain diluar pemerintahan
 Pokok kendala tersebut, sering terjadi dalam komunikasi terkait permohonan data dan informasi baik untuk penyiapan bahan Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, kunjungan Presiden, maupun untuk audiensi Sekretaris Kabinet. Dalam hal permintaan data, masih membutuhkan waktu dan birokrasi yang cukup memakan waktu sedangkan ada *time limit* yang cukup kecil. Hal ini dapat diatasi jika sistem koordinasi dan birokrasi sudah berjalan efektif dan efisien. Salah satu yang alternatif solusi adalah dengan penggunaan sistem teknologi informasi. Dalam aplikasinya adalah peluncuran aplikasi SITAP (Sitem Informasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden). Akan tetapi, penggunaan aplikasi SITAP masih belum optimal, dikarenakan belum proaktifnya Kementerian Koordinator dalam melaporkan tindak lanjut arahan Presiden tersebut. Di sisi lain, dibutuhkan suatu portal terenkripsi, untuk mengunggah data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif

Dalam penerimaan CPNS tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Perhubungan mendapatkan 2 (dua) orang CPNS dengan latar belakang Pendidikan ekonomi dan hukum, yang kemudian ditempatkan di Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian dan Bidang Perhubungan Udara. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, 13 orang pejabat/pegawai/staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan masih belum mencukupi dengan beban kerja yang diterima. Sehingga perlu dilakukan evaluasi bagi pengadaan CPNS tahun berikutnya agar dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Memperbanyak dan memperluas jaring komunikasi dengan para *stakeholder* terkait guna mempermudah permintaan data dan informasi. Komunikasi tidak hanya

dilakukan oleh pejabat setingkat Asisten Deputi, akan tetapi juga dilakukan oleh tingkat staf. Hal tersebut dilakukan agar, permohonan informasi tidak hanya Top to Down tetapi juga Down to Top yang bertujuan untuk mempercepat respon dari permohonan data dan informasi tersebut.

2. Beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan tidak mengikat pada nomenklatur bidang, akan tetapi dibagi secara merata agar jumlah beban kerja dapat merata di seluruh pejabat, pegawai, dan staf. Akan tetapi, tidak dipungkiri masih dibutuhkan pengadaan staf tambahan untuk mengurangi beban kerja yang diterima oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan anggaran tahun 2018, secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil (realisasi) baik *output* maupun *outcome*. Capaian *output* dan *outcome* untuk Asisten Deputi Bidang Perhubungan melebihi target yang ditetapkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2018. Output atau rekomendasi yang berkualitas yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan sebanyak 296 (dua ratussembilan puluh enam) rekomendasi, sementara *outcome* atau rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 66 (enam puluh enam) rekomendasi.

Adapun capaian realisasi anggaran terserap secara optimal sebanyak Rp.568.398.426,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2018 sebanyak Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 99,71% dari pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2018.

B. Saran

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Perhubungan telah sesuai dengan indikator kinerja. Namun, dalam penyusunannya, masih terdapat data dukung berupa surat masuk dan surat keluar yang belum sistematis, sehingga dalam penyusunannya untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu agar memudahkan penyusunan LKj dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif.

Terkait dengan penyusunan LKj yang lebih baik untuk tahun berikutnya, agar data yang diterima Deputi Bidang Kemaritiman sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Keasdepan di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman. Untuk itu, diperlukan sistem yang terintegrasi dari TU Deputi Bidang Kemaritiman kepada para TU Asdep di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman.

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perhubungan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman


Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan


Syafruddin, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen

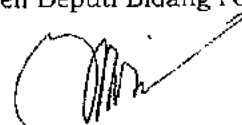
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan	Rp.677.425.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan	Rp.76.210.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perhubungan	Rp.196.365.000,-
Total Anggaran	Rp.950.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Syafruddin, S.H., M.H.

CAPAIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2018

No	Perihal	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	TUSI	BIDANG	SUBBIDANG
1	Hasil Kajian Pembangunan Konektivitas Bandara Dengan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara	714.(2017)	03/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
2	Kendala Anggaran untuk pengadaan tanah jalur kereta api dumaibukti kayu kapur	1.(2018)	04/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
3	Proyek Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	3.(2018)	04/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
4	Laporan Rapat pendalaman pembukaan jalur pelayaran baru di selat malaka pengembangan pulau karimun dan pengembangan pulau rempang sebagai kawasan wisata dan industri baru	4.(2018)	04/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
5	Laporan Rapat Pembahasan Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Luar Jabodetabek (Circular Line)	24.(2018)	18/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
6	Penyampaian Bahan Rapat Dengan PT Pelni (Persero)	32.(2018)	22/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
7	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pendalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran Baru di Selat Malaka, Pengembangan Pulau Karimun dan Pengembangan Pulau Rempang Sebagai Kawasan Wisata dan Industri Baru, Kepulauan Riau	33.(2018)	22/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
8	Kegiatan DED Loopline TA 2018 di BPTJ	36.(2018)	23/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
9	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Perubahan Permenhub Nomor 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air tgl 18 Januari 2018	37.(2018)	23/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
10	Laporan Tinjauan Lapangan dan Pembahasan Usulan Rencana Pengembangan Kawasan Wafani	43.(2018)	25/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
11	Penyampaian Naskah Undangan Rapat Pembahasan Jalur Lingkar Luar Jabodetabek (Circular Line)	52.(2018)	29/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	B-63/Maritim/I/2018	Kemenkomar, BPKP, Kemenkoekon, Kemenhub, Kemenkeu, KemenBUMN, KemenPPN/Bappenas, PT. KAI, PT. KACLI, BPTJ	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
12	Pemohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Penerbangan	53.(2018)	29/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-29/Maritim/I/2018	Deputi Bidang Polhukam	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
13	Kebutuhan Anggaran untuk Kompetisi Keselamatan Publik, Penerbangan, dan Infrastruktur	61.(2018)	29/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-34/Maritim/I/2018	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
14	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 Sektor Transportasi Laut	62.(2018)	30/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	

15	Naskah surat penyampaian hasil rapat pembahasan jalur lingkar luar Jabodetabek (circular line)	64.(2018)	31/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
16	Laporan Aksi Unjuk Rasa Pengemudi Taksi Online pada tanggal 29 Januari 201	65.(2018)	31/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
17	Pemohonan Penetapan Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek TA 2017-2029 (Rperpres RITJ)	11.(2018)	11/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-15/Maritim/1/2018	Seskab	OUTCOME IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
18	Pembahasan reformasi regulasi perizinan berusaha tindak lanjut Perpres 91 Tahun 2017	54.(2018)	29/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
19	Laporan Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lahan Kebonharjo, Semarang dan Pembahasan Perubahan Perpres Nomor 58/2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Komunitas dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional	58.(2018)	29/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
20	Laporan Rapat Perubahan Keppres 12 Tahun 2008 ttg Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Banda Asal Muatan Kapal Tenggelam dan Perubahan Permenhub 71 tahun 2017 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air tgl 25 Jan 18	60.(2018)	29/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
21	Penyampaian Naskah Undangan rapat perkembangan proyek strategis nasional dan program prioritas lainnya di bidang perhubungan	12.(2018)	12/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	
22	Penyampaian Bahan Presentasi Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Presiden di Bidang Perhubungan	16.(2018)	16/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	
23	Laporan Kegiatan Pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Bandara Kertajati) Majalengka - Provinsi Jawa Barat	31.(2018)	22/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-31/Maritim/1/2018	Seskab	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Udara	
24	Laporan Rapat Tindak lanjut Janji Presiden pada Saat Kunjungan Kerja ke Beberapa Daerah	34.(2018)	23/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-35/Maritim/1/2018	Seskab	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
25	Rencana Acara/Kegiatan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 yang perlu dihadiri presiden	35.(2018)	23/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	
26	Penyampaian Bahan Rencana Kegiatan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 yang perlu Dihadiri Presiden	42.(2018)	25/01/2018	Asdep ESDM			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	
27	Laporan Hasil Pertemuan Dengan PT Pelni Membahas Pelaksanaan Tol Laut	50.(2018)	25/01/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	B-86/Maritim/2/2018	K/L	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Laut	
28	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Rancangan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2019 Sektor Transportasi Udara	71.(2018)	05/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
29	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rakor Pedalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran baru di Selat Malaka	77.(2018)	07/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
30	Laporan Rapat tentang tindak lanjut pembangunan LRT Jabodetabek	78.(2018)	07/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
31	Laporan Rapat Pemohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Pelayaran Kesehatan Penerbangan	86.(2018)	12/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
32	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Harmonisasi RPP Pemberdayaan Industri dan RPerpres Pemantauan Implementasi Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100.(2018)	20/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
33	Laporan Perkembangan Pembangunan LRT Sumatera Selatan	111.(2018)	22/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	

34	Laporan Kegiatan Pemantauan dan Raker Pembangunan Jalur KA Tebing Tinggi-kuata Tanjung	114.(2018)	26/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
35	Bahan Rapat Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan TKDN di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 27 Februari 2018	116.(2018)	27/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
36	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri, di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	119.(2018)	28/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
37	Usulan Tambahan Peralatan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan TRhe Annual Meetings of International Monetary Fund and World Bank Group (IMFOWBG) di Bali pada bulan Oktober 2018	67.(2018)	02/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
38	Pemohonan Usulan Sebagai Lembaga Pemrakarsa Relifikasi Protocol to Implement the ninth package of commitment on air transport services under the asean framework agreement on services	70.(2018)	05/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
39	Laporan Rapat tentang Status Tanah Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	87.(2018)	12/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
40	Surat Duta Besar India untuk Indonesia kepada Sekretaris Kabinet	101.(2018)	20/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
41	Bahan Pointers Sekretaris Kabinet Mengenai "Pengangkutan Kapal Barang Ekspor Impor	102.(2018)	20/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	493	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	
42	Penyampaian Dukungan Pemberlakuan Perizinan Lau Lintas Kendaraan (Road Tax) di Pos Lintas Batas Negara Aduak	108.(2018)	20/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
43	Laporan Menteri Perhubungan Menghadiri Singapore Aviation Leadership Summit and Airshow 2018 di Singapura	110.(2018)	22/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
44	Tindak lanjut rancangan perpres tentang penggunaan bersama bandar udara , pengkalan udara dan ruang udara	84.(2018)	08/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
45	Laporan Penanganan Unjuk Rasa Terkait Penolakan PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	85.(2018)	09/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
46	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air tanggal 12 Februari 2018	89.(2018)	12/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
47	Rancangan Instruksi Presiden Tentang Peningkatan Peran Otoritas Pelabuhan Utama Dalam Menjamin Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Makassar	112.(2018)	22/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	531	Seskab	OUTCOME IKK 2	2	Perhubungan Laut	
48	Pemohonan Penetapan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran	120.(2018)	28/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	590	Menko Bid. Kemaritiman, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perhubungan	OUTCOME IKK 2	2	Perhubungan Udara	
49	Laporan Rapat Pembahasan Evaluasi Program Tol Laut dan Kapal Perintis	88.(2018)	12/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Laut	
50	Penyampaian Bahan Rapat Pertemuan Presiden RI dengan Gubernur Kepulauan Riau	115.(2018)	27/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	553/M-221	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Udara	
51	Laporan Kunjungan Kerja Presiden ke Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka	92.(2018)	13/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	

52	Permohonan Audensi Representative Director, President and Chief Executive Officer Mitsui dan CO., LTD. dengan Presiden	99.(2018)	20/02/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	500/M-203	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
53	Laporan Perkembangan Pembangunan Jalur Kereta Api Menuju Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo	125.(2018)	06/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
54	Laporan Dewan Ketahanan Nasional kepada Presiden Mengenai Percepatan Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta	127.(2018)	06/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	690	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
55	Usulan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang dan Konektivitas Transportasi Antar Moda di Kabupaten Kepulauan Anambas	137.(2018)	08/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
56	Laporan rapat terkait taksi online	147.(2018)	14/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
57	Surat Perkenalan Securiport LLC	165.(2018)	21/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	834	Seskab-Menhub	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
58	Laporan hasil rapat koordinasi pengelolaan kawasan perairan kepulauan riau tgl 22 Maret 2018	187.(2018)	29/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
59	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Pelayaran Rakyat	130.(2018)	07/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
60	Optimalisasi Realisasi Program Padat Karya Tunai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dalam rangka Ketahanan Nasional	149.(2018)	14/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
61	Briefing Sheet Pertemuan Sekretaris Kabinet menerima Direktur Utama Dirgantara Indonesia tentang Progres Industri Dirgantara di Indonesia	162.(2018)	21/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	785	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
62	Permohonan Rapat Dengar Pendapat Marin Nusantara	163.(2018)	21/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	

63	Usulan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang dan Konektivitas Transportasi Antar Moda di Kabupaten Kepulauan Anambas	168.(2018)	21/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
64	Penyampaian Hasil Kajian Terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Sektor Transportasi Online	173.(2018)	22/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
65	Percepatan Realignment Singapore Flight Information Region (FIR)	183.(2018)	28/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
66	Rancangan Keputusan Presiden Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TIM Nasional P3DN)	124.(2018)	05/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
67	Permohonan Penetapan Presiden atas Rancangan Perpres Tentang Pengesahan Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation Pasal 50 dan 56	159.(2018)	20/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
68	Laporan Rapat Tentang Pelaksanaan Reformasi Regulasi Kementerian Perhubungan	184.(2018)	29/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
69	Laporan Hasil Kajian tentang Pemberlakuan Permen Perhubungan RI Nomor 108 tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek (Taksi Online)	189.(2018)	29/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
70	Penyampaian Berkas dan Naskah Asli 2 (dua) Peraturan Presiden	126.(2018)	06/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
71	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden Tentang Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan	131.(2018)	07/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
72	Draft Awal Rancangan Keputusan Presiden Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim Nasional P3DN)	140.(2018)	09/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
73	Penyampaian Hasil Rapat Permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Penerbangan di Balai Kesehatan Penerbangan	151.(2018)	16/03/2018	Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara, Deputi Bidang Polhukam			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
74	Laporan Hasil Rapat Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (RKP Timnas P3DN)	166.(2018)	21/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
75	Laporan Rapat Koordinasi Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut di Bali, Tanggal 1 Maret 2018	136.(2018)	08/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Laut	
76	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimawah Yogyakarta	172.(2018)	22/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	
77	Laporan Rapat dan Kunjungan Pelaksanaan Program Tol Laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	191.(2018)	29/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Laut	
78	Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2018/1439H	157.(2018)	19/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	775	Seskab	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
79	Daftar Kegiatan Kementerian Perhubungan Yang Diusulkan Untuk Dapat Diresmikan Oleh Presiden di Provinsi Jawa Timur	164.(2018)	21/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	93.(2018)	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
80	Usulan Rapat Terbatas Mengenai Antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2018	171.(2018)	22/03/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	805/M-334	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	

CAPAIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN BULAN APRIL-JUNI TAHUN 2018

No	Perihal	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	TUSI	BIDANG	SUBBIDANG
1	Pemohonan pembangunan dermaga dan tambatan perahu serta penyediaan moda transportasi darat dan perairan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara	209.(2018)	05/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	938	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
2	Laporan perkembangan pembangunan MRT Jakarta	248.(2018)	17/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
3	Laporan hasil rapat pembahasan rencana pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	241.(2018)	13/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
4	Somasi pembayaran sewa sebidang tanah di stasiun Padang Panjang yang belum dibayar	229.(2018)	11/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
5	Tindak lanjut optimalisasi program tol dalam lingkup operasional Pelabuhan Tanjung Perak	219.(2018)	10/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
6	Laporan menghadiri rapat penyajian substansi intervensi Presiden RI dalam KTT IMT-GT (Koferensi Tingkat Tinggi Indonesia Growth Triangle)	217.(2018)	09/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
7	Laporan hasil rapat evaluasi Proyek Strategis Nasional pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Jabodetabek Circular Line	212.(2018)	06/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	963	Menko Ekonomi, Menhub	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
8	Laporan menghadiri seminar penyusunan kelembagaan penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard)	198.(2018)	03/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
9	Laporan hasil rapat dan kunjungan lapangan pelaksanaan program tol laut di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya	195.(2018)	03/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
10	Laporan Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Beijing Convention 2010, di Daerah Istimewa Yogyakarta	254.(2018)	19/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
11	Penyampaian metrik usulan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 2018 yang dapat diresmikan presiden	244.(2018)	13/04/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
12	Laporan Rapat koordinasi usulan menteri perhubungan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tahun 2018 yang dapat diresmikan Presiden	242.(2018)	13/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
13	Usulan Perubahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Transportasi	225.(2018)	11/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	998	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
14	Laporan Rapat Pembahasan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi	216.(2018)	06/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	

15	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Rangkaian Peringatan Hari Konsumen Nasional	213.(2018)	06/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
16	Penyampaian Bahan Pengarahan Seekab pada RAKORBIDNAS III Kemaritiman PDI Perjuangan	207.(2018)	05/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	942	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
17	Laporan menghadiri acara maritime talk ancaman dan peluang dalam menyongsong poros maritim dunia	196.(2018)	03/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
18	Persetujuan izin prakarsa ratifikasi penyusunan rancangan Perpres tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara	205.(2018)	04/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
19	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Ratifikasi Perjanjian Hubungan Udara RI-Argentina dan RI-Papua Nugini di Serpong, Tangsel	249.(2018)	18/04/2018	Deputi bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
20	Laporan Rapat Pembahasan Pengaturan Perusahaan Aplikasi sebagai Perusahaan Transportasi	247.(2018)	17/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
21	Laporan mengenai penyiapan rancangan keputusan presiden tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Timnas P3DN)	246.(2018)	17/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
22	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Iran	235.(2018)	12/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
23	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penugasan PT Pelindo I (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) untuk pengembangan pelabuhan dan kawasan industri kuala Tanjung	234.(2018)	11/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
24	Pemohonan Usulan Lembaga Pemrakarsa Ratifikasi ASEAN Framework Agreement on The Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST)	233.(2018)	11/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
25	Laporan Menghadiri Rapat Tindaklanjut Implikasi dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI	231.(2018)	11/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
26	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Pemberlakuan Protocol to Amend the MoU of BIMP-EAGA on The Expansion of Air Linkages dan Draft Protocol to Amend the MoU between The Government of IMT-GT on The Expansion of Air Linkages	230.(2018)	11/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
27	Pemohonan Izin Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Ratifikasi Perjanjian Hubungan Udara RI -Papua Nugini dan Republik Indonesia - Republik Argentina	226.(2018)	11/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
28	Bahan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan presiden mengenai penugasan PT Pelindo I dan PT Indonesia Asahan Aluminium pengembangan pelabuhan dan kawasan industri kuala Tanjung	218.(2018)	09/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
29	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Mengenal Permen Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 ttg Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Impor Barang tertentu di kementerian bidang kemaritiman	215.(2018)	06/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	

30	Laporan Rapat Permendag 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu	208.(2018)	05/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
31	Penyampaian Salinan Permohonan Nomor 23/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	203.(2018)	04/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
32	Penyampaian Bahan Rapat Permendag 82 tahun 2017 ttg angkutan laut ekspor impor	194.(2018)	02/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
33	Briefing sheet audiensi Sekretaris Kabinet Dirut PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia	210.(2018)	06/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	931	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
34	Peninjauan Pengembangan Bandar Udara Jenderal Soedirman, di Wirasaba, Purbalingga – Jawa Tengah	261.(2018)	23/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
35	Penyampaian bahan rapat terbatas evaluasi proyek strategis nasional (pen) di sektor transportasi	243.(2018)	13/04/2018	Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
36	Peletakan Batu Pertama Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga	220.(2018)	10/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	964/M-398	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
37	Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Usulan Acara/Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Memerlukan Kehadiran Presiden Tahun 2018	214.(2018)	06/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	
38	Laporan Menghadiri Seminar "Tol Laut: Progres dan pengaruhnya terhadap kedaualatan maritim Indonesia Semarang	211.(2018)	06/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
39	Penyampaian bahan pra ratas mengenai evaluasi proyek strategis nasional pelabuhan hub internasional bitung dan jabodetabek circular line	200.(2018)	04/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Laut	
40	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi di Pulau Bali	197.(2018)	03/04/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
41	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Permohonan Penanaman Modal Atas Nama PT Leachaco Logistik Indonesia	307.(2018)	30/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
42	Permohonan Kerjasama Dan Courtesy Call Presiden Perwakilan Asia Pacific International Air Transport Association	306.(2018)	30/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1547/M-642	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	

43	Laporan Menghadiri Soft Launching Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat (Bandara Kertajati)	301.(2018)	28/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
44	Laporan Rapat Pembahasan Kegiatan Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	299.(2018)	24/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
45	Capaian Infrastruktur Bidang Perhubungan	297.(2018)	23/05/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
46	Penyampaian Bahan Rapat Pelaksanaan Kegiatan Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I, Rabu, 23 Mei 2018, Pk. 09.00, Rupert Lt.2	292.(2018)	22/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
47	Permohonan Pendapat Hukum Terkait Pelaksanaan Kegiatan Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	286.(2018)	17/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	
48	Permintaan Laporan Capaian Kinerja Kabinet Kerja Selama 3,5 Tahun	281.(2018)	17/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
49	Laporan Tindak Lanjut Status Tanah Kwarnas Pada Proyek LRT Jabodetabek	278.(2018)	11/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
50	Permohonan Bertemu / Kedatangan Presiden RI	283.(2018)	17/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
51	Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018	277.(2018)	09/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
52	Laporan Hasil Rapat Penghapusan Pelabuhan - Pelabuhan Tikus di Kepulauan Riau dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lego Jangkar di Perairan Batam, Kepulauan Riau	275.(2018)	09/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
53	Laporan Perkembangan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission - OSS)	272.(2018)	07/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
54	Penyampaian Matriks Capaian Kinerja dan Ieu-leu Strategis di Sektor Perhubungan	269.(2018)	04/05/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
55	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Target Nasional Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	267.(2018)	03/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
56	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan Tanjung Sauh	266.(2018)	03/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
57	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Kawasan Industri Maritim di Tanggamus	265.(2018)	03/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
58	Laporan hasil rapat koordinasi lanjutan pembahasan rancangan peraturan presiden mengenai pengesahan pt pelindo i persero dan pt indonesia esahan aluminium untuk pengembangan pelabuhan an kawasan industri kuala tanjung	264.(2018)	02/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	

59	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Peretujuan Bilateral Angkutan Udara Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Islam Iran	284.(2018)	17/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	448/Maritim/5/2018	Menkomar, Menhub, Menlu	OUTCOME IKK 2	2	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
60	Laporan hasil rapat pembahasan rancangan peraturan presiden (RPERPRES) tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan kawasan industri kuala tanjung di prov sumatera utara	302.(2018)	28/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1550/M-645	Seskab-Menko Ekon	OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
61	Penyampaian bahan rapat RPerpres Kuala Tanjung	298.(2018)	23/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
62	Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung	294.(2018)	22/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
63	Permohonan Penetapan Presiden atas RPerpres tentang pengesahan Protokol terkait amandemen konvensi penerbangan sipil internasional (pasal 50 dan 56)	287.(2018)	17/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
64	Laporan Penyampaian Draft Inpres tentang Peningkatan Peran Otoritas Pelabuhan Utama	285.(2018)	17/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
65	Laporan Menghadiri Rapat Pleno Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM	279.(2018)	14/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
66	Pelaksanaan Reformasi Regulasi Perizinan di Bidang Transportasi	270.(2018)	04/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
67	Briefing Sheet Rakor Pembangunan Badar Udara Kediri, Hari Rabu 2 Mei 2018	263.(2018)	02/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
68	Penyampaian briefing sheet bahan rapat terbatas persiapan menyambut Idul Fitri 1439H/2018 M	303.(2018)	30/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	910/M-377	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
69	Laporan Rapat tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029	280.(2018)	15/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
70	Usulan Kegiatan Peresmian Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau	271.(2018)	07/05/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
71	Penyampaian Dokumen Course Information Dan Koica Application Form	328.(2018)	08/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	223.(2018)	Deputi Bidang Administrasi	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
72	Rencana Penerapan Online Single Submission (OSS)	325.(2018)	08/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
73	Penyampaian Salinan Putusan Mk Nomor 97/Puu-Xv/2017 Dalam Perkara Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	322.(2018)	07/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
74	Undangan Rapat Pembahasan Percepatan Operasional Dryport Di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	319.(2018)	06/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	539/Maritim/6/2018	Kemenkoekon, Kemenhub, KemenIndutri, Pemda	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	

75	Briefing Sheet Bahan Rapat Rencana Pembangunan Pesawat Tempur Kfx/1fx	318.(2018)	06/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
76	Penyampalan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2018 Di Bidang Perhubungan	316.(2018)	04/06/2018	Asdep Bidang ESDM			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
77	Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	315.(2018)	04/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
78	Laporan Menghadiri Rapat Penanganan Permasalahan Bidang Kawasan Khusus Lingkup II	314.(2018)	04/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
79	Permohonan Pengundangan Perpres Nomor 46 & 47 Tentang Pengesahan Amendemen Konvensi Chicago Pasal 50 (A) Dan 56	320.(2018)	06/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
80	Rancangan Inpres Peningkatan Peran Otoritas Pelabuhan Utama Dalam Menjamin Kelancaran Arus Barang Di Pelabuhan	327.(2018)	08/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
81	Penyampalan Salinan Perpres 46 Tahun 2018 Dan Perpres Noor 47 Tahun 2018	326.(2018)	08/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
82	Tindak Lanjut Ratas Tentang Perkembangan Persiapan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund World Bank Tahun 2018 Pada 26 Juni 2018	331.(2018)	29/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
83	Laporan Hasil Rapat Dan Kunjungan Lapangan Pelaksanaan Program Tol Laut Di Pelabuhan Makassar, Sumatera Selatan	323.(2018)	08/06/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut

CAPAIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN BULAN JULI-SEPTEMBER TAHUN 2018

No	Perihal	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	TUSI	BIDANG	SUBBIDANG
1	Penyampaian Bahan Paparan Rapat Pembahasan Kebijakan Fasilitas Pendanaan Untuk Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN)	390.(2018)	31/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
2	Laporan Menghadiri Rapat Implementasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006	375.(2018)	23/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Perekonomian			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
3	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pereemian Pelabuhan Kuala Tanjung, Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Beserta Konektivitas Kawasan	374.(2018)	23/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Perekonomian			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
4	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Sumatera Utara	366.(2018)	11/07/2018	PPK Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
5	Ucapan Kegiatan Pereemian Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan	358.(2018)	10/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1825/M-762	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
6	Pelaksanaan Pp 24 Tahun 2018 (PP OSS)	351.(2018)	03/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
7	Laporan Hasil Rapat Perubahan Regulasi Fiskal di KEK	340.(2018)	02/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
8	Laporan Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Bandar Udara Kediri	349.(2018)	05/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
9	Laporan Sosialisasi Peraturan Presiden No 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	380.(2018)	25/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
10	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Penggunaan Produk Dalam Negeri (RKeppres Timnas P3DN)	373.(2018)	23/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Perekonomian			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
11	Capaian Program/kegiatan prioritas nasional pentauan Kantor Staf Presiden (KSP) tahun 2018 dan 2019 di bidang Perhubungan	364.(2018)	11/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
12	Laporan Terkait Kebakaran di Gedung Kementerian Perhubungan	363.(2018)	11/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1827/M-763	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
13	Penyampaian Laporan Perkembangan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC)	360.(2018)	10/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian

14	Laporan Penyempalan Aspirasi tentang tenggelamnya kapal motor sinar bangun di Danau Toba, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	354.(2018)	09/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1824	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
15	Laporan Hasil Rapat pembahasan Percepatan Operasional DRY PORT di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Sumatera Utara	353.(2018)	09/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1831	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
16	Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pengaturan Ojek Online)	348.(2018)	05/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
17	Penyelenggaraan Tol Laut	341.(2018)	03/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
18	Rencana penerapan Online Single Submission (OSS)	339.(2018)	02/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
19	Pemohonan pelaksanaan pencanangan sistem OSS	338.(2018)	02/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
20	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Keselamatan Transportasi Maritim	332.(2018)	02/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
21	Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Bandara Kediri	337.(2018)	02/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
22	Laporan Rapat Koordinasi Rencana Percepatan Pembangunan Bandar Udara Kediri, 12 Juli 2018 di Kantor Bupati Kediri	372.(2018)	18/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
23	Pemohonan Dukungan Untuk memenuhi anggaran kebutuhan bmtg tahun 2019 sesuai renstra 2015-2019	376.(2018)	24/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2082/M-861	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
24	Perpres Kuala Tanjung	381.(2018)	26/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
25	Tindak Lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara	362.(2018)	10/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	
26	Pemohonan Usulan Pemrakarsa	359.(2018)	10/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
27	Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Rinpres Peran Otoritas Pelabuhan utama dalam Menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan 5 Juli 2018	347.(2018)	04/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
28	Briefing Sheet Bahan Rapat Draft RKeppres Tim Nasional P3DN Dan RPermenko Sekretaris Tim Nasional P3DN	371.(2018)	18/07/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	

29	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	440.(2018)	28/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
30	Penyelenggaraan Tot Laut pada Pelabuhan Tanjung Perak	437.(2018)	28/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1724	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
31	Rapat pembahasan usulan perpanjangan runway dan ganti rugi pembebasan lahan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Patu	432.(2018)	27/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2335	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
32	Perelapan Integrasi Perizinan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) OSS	427.(2018)	21/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2353	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	
33	Bahan rapat usulan perpanjangan runway dan ganti rugi pembebasan lahan bandara Mutiara	424.(2018)	20/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
34	Laporan menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam rangka IMF World Bank Annual Meeting	422.(2018)	20/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
35	Usulan Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat	418.(2018)	15/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2513	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
36	Surat NGO Global Anti-Aerotropolis Movement (GAAM)	392.(2018)	02/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2261	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	
37	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Pelabuhan Kuala Tanjung Beserta Konektivitas Kawasannya di Sumatera Utara	391.(2018)	01/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
38	Laporan Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas)	438.(2018)	28/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
39	Permohonan Tindak Lanjut Pembangunan pelabuhan dan akses Ujung Jabung provinsi Jambi	436.(2018)	28/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2348	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
40	Undangan Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lahan Kebonharjo, Semarang	435.(2018)	28/08/2018	Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
41	Rapat usulan perpanjangan runway dan ganti rugi pembebasan lahan bandar udara Mutiara Patu	423.(2018)	20/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan

42	Penyampaian Aspirasi Pelaku Usaha Angkutan Truk Terkait Kebijakan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL)	417.(2018)	15/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
43	Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Mengenai Kebijakan Fasilitas Pendanaan untuk Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Non Proyek Strategis Nasional (Non-PSN)	414.(2018)	10/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2205	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	
44	Pemohonan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kontainer Tanjung Sauh Batam	413.(2018)	10/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
45	Pemohonan groundbreaking Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Perseberangan Nasional Balohan	412.(2018)	10/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2239	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	
46	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Mengenai Implementasi Maritime Labour Convention 2006, di Depok, Tanggal 6-7 Agustus 2018	411.(2018)	09/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
47	Undangan Rapat Pembahasan Kebijakan Fasilitas Pendanaan Untuk Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Non PSN	410.(2018)	08/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
48	Laporan Sosialisasi Naik LRT Sumatera Selatan	401.(2018)	06/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
49	Briefing Sheet Bahan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Apron Bandara I Gusti Ngurah Rai	400.(2018)	06/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelangkaan dan Pengoperasian Penerbangan
50	Laporan Rapat Pembahasan Kebijakan Fasilitas Pendanaan Untuk Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN)	396.(2018)	03/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2115	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
51	Laporan Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban	399.(2018)	06/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2140/M-886	Seskab-Presiden	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
52	Pemohonan Izin Pemrakarsa Ratifikasi 3 (Tiga) Persetujuan Hubungan Udara	429.(2018)	23/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
53	Pemohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPP tentang Penyelenggaraan Pelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	433.(2018)	28/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1823	Seskab	OUTCOME IKK 2	2	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
54	Laporan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Ratifikasi Asean Framework Agreement on The Facilitation of Inter State Transport (AFAFIST)	434.(2018)	28/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
55	Pemohonan Audiensi dengan Presiden dari Vice Chairman GVK (Mr G V Sanjay Reddy) untuk Menyampaikan Keterbukaan Berinvestasi di Indonesia	402.(2018)	06/08/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	
56	Pemohonan Persetujuan Rapat Pembahasan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Akses Bandara Adi Soemarmo dan Bandara Kulonprogo, Revitalisasi Bandara Adi Soemarmo, dan Pembangunan Bandar Udara Baru Kulonprogo	484.(2018)	27/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian

57	Penyampaian Bahan Penyusunan Laporan 4 Tahun Jokowi-Jusuf Kalla	478.(2018)	21/09/2018	Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
58	Penyampaian Naskah Ucapan Selamat Hari Kereta Api	474.(2018)	18/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2585	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
59	Penyampaian Kinerja semester 1 tahun 2018 PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	471.(2018)	14/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
60	Laporan Menghadiri Undangan Rapat dan Kunjungan Lapangan Terkait Pengembangan Teluk Sabang Sebagai Pelabuhan Hub Wisata Bahari Internasional	467.(2018)	10/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
61	Pemmasalahan PT Karya Cipta Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero	466.(2018)	10/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2714	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
62	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Pengembangan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	462.(2018)	07/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
63	Laporan Sekretaris Perjalanan Kunjungan Kerja Presiden ke Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Yogyakarta, pada tanggal 13 sd 15 Juli 2018	458.(2018)	06/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
64	Laporan Kecelakaan Kapal dan Upaya Penanggulangannya	450.(2018)	06/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2521	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
65	Penyampaian Briefing Sheet FGD tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi	486.(2018)	27/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
66	Briefing Sheet Bahan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai	485.(2018)	27/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan
67	Laporan Rapat Tata Kelola Tim Nasional P3DN	483.(2018)	27/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
68	Briefing Sheet Rapat Koordinasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	477.(2018)	20/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
69	Usulan daftar kegiatan pereemian dari kementerian perhubungan di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	470.(2018)	12/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	
70	Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah Bandara Silangit	469.(2018)	12/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan dan Pengoperasian Penerbangan

71	Rencana Kegiatan Pemantauan	468.(2018)	10/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
72	Penyampaian Memo Aspirasi Pelaku Usaha Angkutan Truk Terkait Kebijakan Pengendalian Over Dimension Over Loading	461.(2018)	07/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
73	Perkembangan Percepatan Pembangunan Bandar Udara Kediri	457.(2018)	06/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	
74	Permohonan Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan	453.(2018)	06/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	351.(2018)	Deputi	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	
75	Salinan kepres nomor 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN	473.(2018)	17/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
76	Permohonan Permintaan Kementerian Perhubungan Salinan Sesuai Aslinya Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 47 Tahun 2018	449.(2018)	06/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	
77	Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	445.(2018)	03/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
78	Permohonan Audiensi Vice Chairman GVK (Mr G V Sanjay Reddy) kepada Presiden Guna Menyampaikan Ketertarikan Berinvestasi di Indonesia	463.(2018)	07/09/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2522	Seskab	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan

CAPAIAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN BULAN OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2018

No	Perihal	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	KEPADA	ASSESMENT CAPAIAN	TUSI	BIDANG	SUBBIDANG
1	Intisari Hasil Kajian tentang Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasinya Dalam Rangka Ketahanan Nasional	539.(2018)	31/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kepelabuhan
2	Pemohonan Audial dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPP APBM)	538.(2018)	31/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
3	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	537.(2018)	31/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelainan dan Pengoperasian Penerbangan
4	TOR-KAK Soekarno Hatta	535.(2018)	29/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Angkutan dan Bandar Udara
5	Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Peran Otoritas Pelabuhan Utama Dalam Menjamin Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan	533.(2018)	29/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	3017	Seskab	OUTCOME IKK 2		Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
6	Rencana penyesuaian tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yaitu tarif paket B/M domestik di terminal petikemas PT Kaltim Kariangau Terminal Balikpapan	531.(2018)	26/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
7	Laporan Rapat pembahasan kemajuan proyek LRT Provinsi Sumsel	530.(2018)	26/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
8	Usulan Kegiatan Pemantauan	521.(2018)	25/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Angkutan dan Bandar Udara
9	Penyampaian Bahan Pointers Sekretaris Kabinet Mengenai "Pelaksanaan Tol Laut di Kabupaten Manokwari Selatan (Pelabuhan Oransbari)	518.(2018)	23/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
10	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara	516.(2018)	19/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
11	Briefing Sheet Bahan Rapat Pembangunan Bandara Kediri	515.(2018)	19/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelainan dan Pengoperasian Penerbangan
12	Usulan peresmian bandara APT Pranoto dan Bandara Maratua	514.(2018)	19/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelainan dan Pengoperasian Penerbangan
13	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Pembahasan Kebijakan Fasilitas Penyediaan Infrastruktur Non-Proyek Strategis Nasional (Non-PSN)	513.(2018)	18/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat

14	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi PY T Bibu Panji Sakti dengan Sekretaris Kabinet	510.(2018)	16/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2866	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
15	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Tata Kelola Tim Nasional P3DN	504.(2018)	10/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
16	Usulan Pokok Bahasan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Bidang Perhubungan	501.(2018)	08/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
17	Permohonan Audiensi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bibu Panji Sakti Kepada Sekretaris Kabinet	500.(2018)	05/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2796	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
18	Laporan Focus Group Discussion (FGD) tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi	498.(2018)	04/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2760	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
19	Usulan Pokok Bahasan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Bidang Perhubungan	497.(2018)	03/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
20	Laporan Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan Kerangka Kerja tentang fasilitas angkutan natar negara (ASEAN Framework agreement on the facilitation of interstate transport/AFAFIST	496.(2018)	02/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
21	Bahan Ratas Perkembangan Persiapan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund World Bank Tahun 2018	495.(2018)	02/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	2721	Seskab	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
22	Laporan hasil rapat koordinasi tanggal 27 september 2018 terkait pengembangan bandar udara	494.(2018)	01/10/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
23	Rencana kegiatan kunker ke bandara soekarno-hatta dan pelabuhan tanjuk priok	584.(2018)	27/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Angkutan dan Bandar Udara
24	Laporan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Integrasi Transportasi Antar Moda	582.(2018)	26/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
25	Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Progress PSN Kawasan Industri Jorong	581.(2018)	26/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Laut	Kepelabuhan
26	Undangan Rapat Pembahasan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Jorong	574.(2018)	21/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1065/Maritim/11/2018	K/L	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kepelabuhan
27	Permohonan Bantuan Dana untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua	573.(2018)	19/11/2018	Deputi dan Seskab			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Angkutan dan Bandar Udara

28	Laporan Rapat Usulan Ratas Evaluasi Pelaksanaan Program Tol Laut	572.(2018)	16/11/2018	Deputi dan Seskab	3276	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
29	Usulan Rapat Terbatas Persiapan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019	570.(2018)	16/11/2018	Deputi, Seskab, dan Presiden	3292	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
30	Penyampaian Briefing Sheet Bahan Audiensi Sekretaris Kabinet dengan PT Jorong Port Development	565.(2018)	14/11/2018	Deputi dan Seskab	3217	Seskab	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
31	Rencana Kegiatan Pemantauan Tata Kelola Pelabuhan Tanjung Priok dan Tata Kelola Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta	564.(2018)	14/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Angkutan dan Bandar Udara
32	Penyampaian Bahan Pointers Rapat Evaluasi Program Tol Laut	563.(2018)	13/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
33	Laporan Rapat Koordinasi Terkait Kereta Cepat Jakarta-Surabaya	561.(2018)	12/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
34	Permohonan Sebagai Badan Usaha Pelabuhan PT Kawasan Industri Nusantara	560.(2018)	09/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	3177	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
35	Penyampaian Konsep Undangan Pra Ratas Evaluasi Program Tol Laut	558.(2018)	09/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	1024/Maritim/11/2018	K/L	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kepelabuhan
36	Undangan Rapat Koordinasi terkait Rencana Penyusunan Rancangan Inpres tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi	557.(2018)	09/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 2	2	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
37	Laporan Evaluasi Capaian Program Padat Karya Tunai Desa Tahun 2018	546.(2018)	01/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
38	Rencana Penyesuaian Tarif Jasa Kebandarudaraan	545.(2018)	01/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	3326	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
39	Laporan Hasil Kunjungan ke Pelabuhan Muara Suak , Jambi	544.(2018)	01/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
40	Permohonan Pendapat Teknis Pelaksanaan Renovasi Gedung Karya	543.(2018)	01/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
41	Laporan Rapat Koordinasi tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi	542.(2018)	01/11/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	3095	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat

42	Penyampaian Artikel "Keselamatan Transportasi"	541.(2018)	01/11/2018	Asdep Bidang Humas dan Protokol			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
43	Kegiatan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi	625.(2018)	21/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
44	Tindak Lanjut Kegiatan Proyek Strategis Nasional Kereta Api Purukcahu-Banguang di Provinsi Kalimantan Tengah	619.(2018)	21/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
45	Permohonan Audiensi Terkait Perkembangan Pemenuhan Hak Korban Kasus Kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610	618.(2018)	21/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
46	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Koordinasi Keselamatan Transportasi di Pelabuhan Merak	615.(2018)	19/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
47	Laporan Menteri Perhubungan Perjalanan Dinas ke Bangkok, Thailand tanggal 8-9 November 2018	614.(2018)	18/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
48	Briefing Sheet Bahan Ratas Persiapan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019	613.(2018)	18/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-486	Seskab	OUTCOME IKK 3	3	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Darat
49	penyampaian briefing sheet kunjungan kerja dan pemantauan tata kelola navigasi penerbangan Indonesia	611.(2018)	18/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 3	3	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
50	laporan rapat rencana pembangunan jalur lingkar melintang melayang (elevated loopline)	610.(2018)	17/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Transportasi Perkeretaapian
51	permohonan izin pemanfaatan pengalihan udara angkutan darat gatot subroto way tuba kabupaten way kanan menjadi bandara penerbangan sipil	609.(2018)	17/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan
52	Laporan hasil rapat dan kunjungan kerja ke soekarno hatta dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi	608.(2018)	17/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Angkutan dan Bandar Udara
53	Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Transportasi Tembak	600.(2018)	11/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman	M-492	Seskab	OUTCOME IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kenavigasian, Lalu lintas, dan Angkutan Laut
54	Laporan Rapat pembahasan Permohonan Audiensi PT Jorong Port Development dan Permohonan Rencana Pengoperasian Utilitas dan Groundbreaking Pembangunan Beberapa Fasilitas Tenant di Kawasan Industri Jorong oleh Presiden	597.(2018)	07/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Laut	Kepelabuhan
55	Kegiatan Pemantauan di Pelabuhan Merak dan Kantor Pusat Anev	595.(2018)	06/12/2018	Deputi Bidang Kemaritiman			OUTPUT IKK 1	1	Perhubungan Udara	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan dan Pengoperasian Penerbangan

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun Detil
Periode s.d. 31 Desember 2018

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2018 Tgl. 12 Desember 2017

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 5

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		950.000.000	570.000.000	236.004.199	332.394.227	568.398.426	99,71	1.601.574
13	DEPUTI MARITIM	950.000.000	570.000.000	236.004.199	332.394.227	568.398.426	99,71	1.601.574
1303	ASDEP BIDANG PERHUBUNGAN	950.000.000	570.000.000	236.004.199	332.394.227	568.398.426	99,71	1.601.574
06.5829	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERHUBUNGAN	950.000.000	570.000.000	236.004.199	332.394.227	568.398.426	99,71	1.601.574
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	950.000.000	570.000.000	236.004.199	332.394.227	568.398.426	99,71	1.601.574
001.006	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perhubungan	950.000.000	570.000.000	236.004.199	332.394.227	568.398.426	99,71	1.601.574
511	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan	677.425.000	533.228.000	228.254.199	303.503.827	531.758.026	99,72	1.469.974
511.AA	Pengumpulan Data	117.928.000	143.106.000	81.864.000	60.870.300	142.734.300	99,74	371.700
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	14.000.000	13.900.000	0	13.900.000	99,28	100.000
-001	-	0	14.000.000	13.900.000	0	13.900.000	99,28	100.000
21-12-2018	000091-08/C-01 Soerjanto Tjahjono, Agus Wahyu Raharjo, Didi Hamzar, Honorarium Narasumber dan Moderator pada FGD tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi, di Sekretariat Kabinet, Jakarta, tanggal 28 September 2018	0	0	13.900.000	0			
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	103.828.000	124.006.000	62.864.000	60.870.300	123.734.300	99,78	271.700
-001	-	103.828.000	124.006.000	62.864.000	60.870.300	123.734.300	99,78	271.700
31-01-2018	000005-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH	0	0	0	13.041.000			
LS Perjalanan Dinas	Melaksanakan Pemantauan Proyek Strategis Nasional Bandar Udara Internasional Jawa Barat Majalengka-Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 18-20 Januari 2018, a.n. Syafruddin dkk							
01-03-2018	000020-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH	0	0	0	25.781.300			
LS Perjalan Bulan	Melaksanakan Pemantauan Proyek Pembangunan Jalur Kereta Binjai-Besitang, jalur Layang Kereta Api Medan-Bandar Khalipah, dan Jalur Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara, tanggal							
09-04-2018	000044-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH, Benni Kusriyadi, Eki Marzuki,	0	0	0	22.048.000			
LS Perjalan Bulan	Pemantauan dalam rangka Perumusan dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Perpres 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang dari dan ke Daerah							
26-12-2018	000093-08/C-01 M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., dkk (19 orang)	0	13.840.000	0	0			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Navigasi Penerbangan di Kantor Pusat Airnav Indonesia, Tangerang, Banten, tanggal 18 Desember 2018							
26-12-2018	000094-08/C-01 M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., dkk (19 orang)	0	33.804.000	0	0			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Tata Kelola Pelabuhan Merak, di Provinsi Banten, tanggal 19-20 Desember 2018							
26-12-2018	000095-08/C-01 M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., dkk (17 orang)	0	15.220.000	0	0			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Tata Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta, di Provinsi Banten, tanggal 3 Desember 2018							
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	14.100.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	100,00	0
-001	-	14.100.000	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	100,00	0
06-07-2018	000043-08/C-01 Rojat, S.Sos., dkk	0	900.000	0	0			
	Transport Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan periode Bulan Januari 2018							
18-10-2018	000078-08/C-01 Adnan, S.Sos., dkk	0	1.800.000	0	0			
	Transport Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan Periode Bulan Maret-April 2018							
26-11-2018	000088-08/C-01 Rojat, S.Sos., dkk	0	1.200.000	0	0			
	Transport Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan periode Bulan Maret-September 2018 (Mengantar Berkas/Surat)							

		Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
28-12-2018	000107-08/C-01	Benni Kusriyadi, S.ST dkk Bantuan transport dalam kota bulan September-Desember 2018		0	1.200.000	0			
	511.AB	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya	559.497.000	390.122.000	146.390.199	242.633.527	389.023.726	99,71	1.098.274
	521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	12.500.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	-	12.500.000	0	0	0	0	0,00	0
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	55.500.000	92.850.000	92.850.000	0	92.850.000	100,00	0
	-001	-	55.500.000	92.850.000	92.850.000	0	92.850.000	100,00	0
01-02-2018	000004-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH, dkk 17 orang Uang Saku RDK Pembahasan dan Penyiapan Laporan Kinerja di Bidang Perhubungan Tahun 2017, Jakarta 17 Jan 2018 - Sprint05/Maritim/1/2018 17 Jan 2018		0	5.850.000	0			
01-02-2018	000005-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH, dkk 19 orang Uang Saku RDK Pembahasan Laporan Kinerja 2017 dan Penyiapan Program Kegiatan di Bidang Perhubungan Tahun 2018, Jakarta 23 Jan 2018 - Sprint06/Maritim/1/2018 23 Jan 2018		0	6.550.000	0			
02-03-2018	000008-08/C-01	Syafruddin, S.H., M.H., dkk 31 orang Uang saku RDK Pembahasan Rancangan Inpres tentang Peningkatan Peran Otoritas Pelabuhan Utama dalam Menjamin Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,		0	10.650.000	0			
14-03-2018	000012-08/C-01	Adnan, S.Sos., dkk Transportasi Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan, Periode Bulan Januari-Maret 2018		0	3.600.000	0			
26-03-2018	000016-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH, dkk 18 orang Uang Saku RDK Pembahasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan TKDN, Jakarta 8 Maret 2018, Sprint.9/Maritim-3/3/2018, Jakarta 8 Maret 2018		0	6.300.000	0			
26-03-2018	000017-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH, dkk 16 orang Uang Saku RDK Pembahasan Penyiapan Hasil Rapat Taksi Online, Jkt 12 Maret 2018, Sprint.10/Maritim-3/3/2018, Jakarta 12 Maret 2018		0	5.650.000	0			
09-04-2018	000020-08/C-01	Syafruddin, S.H., M.H., dkk 16 orang Uang Saku RDK Pembahasan Penyiapan Hasil Rapat terkait Taksi Online, tanggal 26 Maret 2018, Sprin.11/Maritim-3/3/2018, tanggal 26 Maret 2018		0	5.550.000	0			
06-07-2018	000040-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH, dkk Uang Saku RDK Pembahasan Penyiapan Hasil Rapat Terkait Usulan Kegiatan Kementerian Perhubungan yang Perlu dihadiri Presiden, tanggal 12 April 2018, Sprin.11/Maritim-3/4/2018, Tanggal 12 April 2018		0	5.650.000	0			
06-07-2018	000041-08/C-01	Syafruddin, S.H., M.H, dkk Uang Saku RDK Pembahasan Rumusan Perizinan dalam Kementerian Perhubungan, tanggal 20 April 2018, Sprin.12/Maritim-3/4/2018, tanggal 20 April 2018		0	5.350.000	0			
06-07-2018	000042-08/C-01	Syafruddin, S.H., M.H., dkk Uang Saku RDK Pembahasan Laporan Hasil Rapat Terbatas Terkait Persiapan Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439H dari Sektor Perhubungan, ESDM, dan Pariwisata, tanggal 30 Mei 2018,		0	5.650.000	0			
03-09-2018	000056-08/C-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.SI., dkk 29 orang Uang Saku RDK Pembahasan Kebijakan Fasilitas Pendanaan untuk Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Non PSN, tanggal 7 Agustus 2018, Sprin.79/Maritim/8/2018, tanggal 7 Agustus 2018		0	10.050.000	0			
18-10-2018	000076-08/C-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.SI., dkk Uang Saku RDK Pembahasan dan Penyiapan Laporan Hasil Rapat Peningkatan Keselamatan Transportasi di Bidang Perhubungan, tanggal 28 September 2018		0	9.100.000	0			
09-11-2018	000083-08/C-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.SI., dkk Uang Saku RDK Pembahasan dan Penyiapan Laporan Hasil Rapat Koordinasi tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi, tanggal 25 Oktober 2018		0	7.200.000	0			
14-11-2018	000087-08/C-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.SI., dkk Transport Dalam Kota Asdep Bidang Perhubungan periode Bulan Februari-September 2018 (Menghadiri Rapat)		0	2.250.000	0			
26-12-2018	000096-08/C-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.SI., dkk (15 orang) Transportasi Dalam Kota dalam rangka Pemantauan Pelabuhan Tanjung Priok, tanggal 4 Desember 2018		0	2.250.000	0			
26-12-2018	000119-08/C-01	Romi Fajar Ali, S.H., dkk Bantuan Transport Dalam Kota periode Bulan Agustus-November 2018		0	1.200.000	0			
	524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	184.575.000	263.792.000	53.540.199	209.502.273	263.042.472	99,71	749.528
	-001	-	184.575.000	263.792.000	53.540.199	209.502.273	263.042.472	99,71	749.528
31-01-2018	000004-08/D-01	Chairul Saleh, S.H., LL.M. LS Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Koordinasi Pendalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran Baru di Selat Malaka, Pengembangan Pulau Karimun dan Pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Wisata dan Industri Baru, pada		0	0	12.460.000			

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
31-01-2018	000006-08/D-01 Mela Meilania, A.Md.		0	0	1.831.000			
	LS Perjalan Dinas Menghadiri Tinjauan Lapangan dan Pembahasan Usulan Rencana Pengembangan Kawasan Walini							
12-02-2018	000010-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH		0	0	2.250.000			
	LS Perjalan Bulan Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Konvensi Internasional yang telah Diratifikasi di Depok Jawa Barat, pada tanggal 25 Januari 2018, a.n. Syafruddin, dkk.							
21-02-2018	000014-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH		0	0	41.840.000			
	LS Perjalan Bulan Menghadiri Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018, tanggal 23-25 Februari 2018, di Bandung, Jawa Barat, a.n. Syafruddin, S.H., MH dkk (13 orang)							
13-03-2018	000030-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH		0	0	19.130.000			
	LS Perjalan Bulan Menghadiri Rapat Koordinasi Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut di Bali, tanggal 28 Februari 2018 -2 Maret 2018, a.n. Syafruddin dkk (3 orang)							
09-04-2018	000045-08/D-01 Benni Kusriyadi, S.ST		0	0	3.805.800			
	LS Perjalan Bulan Menghadiri Maritime Talk Tol Laut Progres dan Pengaruhnya Terhadap Kedaulatan Maritim Indonesia di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, tanggal 30 Maret-1 April 2018, a.n. Benni Kusriyadi							
10-04-2018	000048-08/D-01 Benni Kusriyadi, M.Eki Marzuki, Fahriansah		0	0	2.940.000			
	LS Perjalan Bulan Menghadiri Seminar Hukum Laut Internasional di Depok, Jawa Barat, tanggal 29 Maret 2018, a.n. Benni Kusriyadi dkk (3 orang)							
12-04-2018	000050-08/D-01 Chairul Saleh, S.H., LL.M.		0	0	980.000			
	LS Perjalan Bulan Mendampingi Deputi Bidang Kemaritiman dalam Rangka Menjadi Dosen Tamu Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam Mempersiapkan Kualitas Lulusan Sarjana Hukum Siap Pakai di Bidang Perundang-Undangan,							
12-04-2018	000052-08/D-01 Adnan, S.Sos., Manda Kumoro Saraswati		0	0	1.700.000			
	LS Perjalan Bulan Menghadiri Rapat Pembahasan Pemberlakuan Protocol to Amend The MoU of BIMP-EAGA on The Expansion of Air Linkages dan Draft Protocol to Amend The MoU between The Government of IMT-GT on The							
02-05-2018	000028-08/C-01 Syafruddin dan Adnan		0	11.136.200	0			
	Menghadiri Undangan FGD Beijing Convention 2010, diselenggarakan Ditjen Perhubungan Udara, di Yogyakarta, tanggal 16-18 April 2018, a.n. Syafruddin dan Adnan							
02-05-2018	000029-08/C-01 Manda Kumoro Saraswati, dan Hami Prabowo		0	1.624.000	0			
	Menghadiri Rapat Pembahasan Ratifikasi Perjanjian Hubungan Udara RI - Papua Nugini dan RI-Republik Argentina, tanggal 12-13 April 2018, di Tangerang Selatan, Banten							
04-06-2018	000067-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH, Adnan, Rojat, Marulloh		0	0	9.756.000			
	LS Perjalan Bulan Menghadiri Soft Launching Bandar Udara Internasional Jawa Barat, di Majalengka, Jawa Barat, tanggal 24-25 Mei 2018							
17-07-2018	000048-08/C-01 Chairul Saleh, S.H., LL.M., M. Eky Marzuki		0	2.060.000	0			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Tanggal 4 Juli 2018, di							
23-07-2018	000074-08/D-01 M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., dan Benni Kusriyadi		0	0	11.934.000			
	LS Perjalan Bulan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, tanggal 15-17 Juli 2018, di Medan, Sumatera Utara							
23-07-2018	000075-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH, Adnan, Rojat		0	0	15.260.240			
	LS Perjalan Bulan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Bandar Udara Kediri, tanggal 11-13 Juli 2018, di Kediri, Jawa Timur							
24-07-2018	000077-08/D-01 Mela Meilania, A.Md.		0	0	2.117.833			
	LS Perjalan Bulan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Sosialisasi Perpres Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung							
01-08-2018	000079-08/D-01 Ir Agustina Murbaningsih, M.Si., M.Faisal Yusuf, M.Eki		0	0	22.748.100			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Peresmian Pelabuhan Kuala Tanjung beserta Konektivitas Kawasannya, di Sumatera Utara, tanggal 26-28 Juli 2018							
04-09-2018	000061-08/C-01 M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., Mela Meilania, Meutia		0	14.674.799	0			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Sosialisasi LRT Sumatera Selatan, di Palembang, tanggal 31 Juli-2 Agustus 2018							
04-09-2018	000064-08/C-01 Chairul Saleh, S.H., LL.M., Romi Fajar Ali		0	3.010.000	0			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Kinerja Kedepkatan Bidang DKK dalam rangka Pemantapan Pelayanan Persidangan kabinet, di Bogor, tanggal 3-4 Agustus 2018							
21-09-2018	000090-08/D-01 Rojat, S.Sos.		0	0	5.973.600			
	LS Perjalan Bulan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Percepatan Pembangunan Apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, tanggal 8-9 Agustus 2018, di Bali							
21-09-2018	000094-08/D-01 Chairul Saleh, S.H., LL.M., dan Benni Kusriyadi		0	0	13.711.800			
	LS Perjalan Bulan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Kunjungan Lapangan dan Pertemuan dengan BPKS, di Sabang, Aceh, tanggal 4-6 September 2018							
24-09-2018	000096-08/D-01 Chairul Saleh, S.H., LL.M.		0	0	850.000			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Pembahasan Implementasi Maritime Labour Convention 2006, di Depok, Jawa Barat, tanggal 6-7 Agustus 2018							
22-10-2018	000107-08/D-01 Syafruddin, S.H., MH, dan Adnan		0	0	12.959.200			
	LS Perjalan Bulan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Internasional Provinsi Yogyakarta, tanggal 14-16 Oktober 2018, di Kulonprogo, Yogyakarta							

		Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
13-11-2018	000112-08/D-01	Chairul Saleh, S.H., LL.M.		0	0	5.628.000			
	LS Perjadin	Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Technical Seminar on International Maritime Organization (IMO) Capetown Agreement tgl 31 Oktober - 3 November 2018 di Bali							
14-11-2018	000115-08/D-01	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi Kemaritiman		0	0	15.922.000			
	LS Perjadin Oktober								
12-12-2018	000129-08/D-01	Adnan, S.Sos.		0	0	5.704.700			
	LS Perjadin	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet 2018, tanggal 30 November 2018-2 Desember 2018, di Yogyakarta							
26-12-2018	000097-08/C-01	Chairul Saleh, S.H., LL.M., Benni Kusriyadi, S.ST		0	17.285.200	0			
		Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat dan Kunjungan Kerja ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkel, Sumatera Utara, tanggal 5-7 Desember 2018							
28-12-2018	000115-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH, Chairul Saleh, Maruloh		0	1.500.000	0			
		Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan untuk menjadi Narasumber pada Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi E-Tarif secara Online dalam Mekanisme Usulan Tarif Jasa ke Pelabuhan dan Kibandarudaraan,							
28-12-2018	000118-08/C-01	Chairul Saleh, S.H., LL.M. dkk		0	2.250.000	0			
		Perjalanan dinas dalam rangka workshop ratifikasi oil pollution preparedness co-operation tgl 10-11 Desember 2018 di bogor							
	524219-RM	BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI	306.922.000	33.480.000	0	33.131.254	33.131.254	98,95	348.746
	-001	-	306.922.000	33.480.000	0	33.131.254	33.131.254	98,95	348.746
01-10-2018	000100-08/D-01	Chairul Saleh, S.H., LL.M., dan Eki Marzuki		0	0	33.131.254			
	LS Perjadin Bulan	Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Kegiatan 4th ASEAN-OECD Good Regulatory Practise Network (GRPN) di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 8-12 Oktober 2018							
512		Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan	76.210.000	28.972.000	0	28.890.400	28.890.400	99,71	81.600
	512.AA	Pengumpulan Data	76.210.000	28.972.000	0	28.890.400	28.890.400	99,71	81.600
	521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	-	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	36.910.000	28.972.000	0	28.890.400	28.890.400	99,71	81.600
	-001	-	36.910.000	28.972.000	0	28.890.400	28.890.400	99,71	81.600
02-07-2018	000068-08/D-01	Syafruddin, S.H., M.H., Benni Kusriyadi, Eki Marzuki,		0	0	28.890.400			
	Perjadin Bulan Mei	Menghadiri Perumusan dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Perpres 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang, tanggal 4-6 Juni 2018, di Makassar,							
	524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	-	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	15.300.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	-	15.300.000	0	0	0	0	0,00	0
513		Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perhubungan	196.365.000	7.800.000	7.750.000	0	7.750.000	99,35	50.000
	513.AA	Pengumpulan Data	135.365.000	7.800.000	7.750.000	0	7.750.000	99,35	50.000
	524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	110.465.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	-	110.465.000	0	0	0	0	0,00	0
	524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	7.500.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	-	7.500.000	0	0	0	0	0,00	0
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	17.400.000	7.800.000	7.750.000	0	7.750.000	99,35	50.000
	-001	-	17.400.000	7.800.000	7.750.000	0	7.750.000	99,35	50.000
28-12-2018	000117-08/C-01	M. Falsaf Yusuf, S.IP., M.Si., dkk (21 orang)		0	7.750.000	0			
		Uang Saku RDK Pembahasan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Kunjungan Kerja ke Kantor Alimav, Tanjung Priok, Bandara Soetta, Jakarta 21 Desember 2018							
	513.AB	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya	61.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
-001	-	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	37.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	37.000.000	0	0	0	0	0,00	0
513.AC	Optimalisasi Anggaran Sekretariat Kabinet TA 2018	0	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	0	0	0	0	0	0,00	0

Mengetahui,
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Jakarta Pusat, 02 April 2019
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Muhammad Hilmansyah, S.E.
 NIP. 199005082014021001

Muhammad Hilmansyah, S.E.
 NIP. 199005082014021001

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√ √ √ √
III	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	√ √ √ √ √ √

**Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputan Bidang Kemaritiman**


Sarmuni